Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
TANGGAL 30 JUNI 2026
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	6-117

Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang Tidak Diaudit
tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Hendarno
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili : Jl. Kalijati Indah No. 7, RT 005 RW 001
   Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Bandung
   Nomor Telepon : (022) 452 7101
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Arthur Angelo Syailendra
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 RT 004 RW 003
   Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : (022) 452 7201/ (021) 520 9824
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

2. Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar.

4. Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 November 2026

untuk dan atas nama
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk



Nanang Hendarno	**Arthur Angelo Syailendra**
Direktur Utama	**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. 00507/2.1505/JL.0/06/1814-1/1/XI/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomuniksi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2026, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari inkuiri, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas hal terkait keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada prosedur yang dilaksanakan dalam audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memeroleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karenanya, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 Juni 2026, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Purwanto Susanti dan Surja
Registered Public Accountants KMK No. 69/MK/SK/2025
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future
with confidence

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. 00507/2.1505/JL.0/06/1814-1/1/XI/2026 (lanjutan)

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 terlampir, yang disajikan sebagai informasi keuangan koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 terlampir, tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit, kesimpulan reviu, maupun bentuk keyakinan lain apapun atasnya.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Daniel, CPA
Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 1814

24 November 2026

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2025 (diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2026 (Tidak diaudit/ disajikan kembali)	31 Desember 2025 (Diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,32,37	54.577	34.228
Aset keuangan lancar lainnya	4,32,37	2.008	1.420
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian			
Pihak berelasi	5,32,37	2.011	2.040
Pihak ketiga	5,37	9.745	9.183
Aset kontrak	6,32	2.496	2.290
Persediaan	7	788	901
Biaya kontrak	9	832	932
Klaim restitusi pajak dan pajak dibayar di muka	27	2.431	1.979
Aset tersedia untuk dijual	1e	-	751
Aset lancar lainnya	8,32	6.006	8.042
Jumlah Aset Lancar		80.894	61.766
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak	6,32	127	109
Investasi jangka panjang	10,37	5.836	7.387
Biaya kontrak	9	1.452	1.370
Aset tetap	11,32,35a	161.590	165.453
Aset hak-guna	12a	28.823	27.961
Aset takberwujud	14	9.002	9.237
Aset pajak tangguhan	27f	7.783	6.603
Aset tidak lancar lainnya	13,27,32	6.352	7.873
Jumlah Aset Tidak Lancar		220.965	225.993
JUMLAH ASET		**301.859**	**287.759**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	15,32,37	482	571
Pihak ketiga	15,37	12.779	15.613
Liabilitas kontrak	17a,32	8.254	7.970
Utang lain-lain	37	24.881	648
Utang pajak	27c	4.305	2.025
Beban yang masih harus dibayar	16,32,37	15.024	14.867
Deposit dari pelanggan	32	1.583	1.523
Utang bank jangka pendek	18,32,37	8.797	6.929
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19,32,37	20.477	17.746
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	12a,37	5.650	5.590
Liabilitas terkait aset tersedia untuk dijual	1e	-	466
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		102.232	73.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	27f	2.340	1.233
Liabilitas kontrak	17b,32	2.854	2.851
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	31	1.209	1.308
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	30	12.467	12.996
Pinjaman jangka panjang	19,32,37	27.622	26.099
Liabilitas sewa	12a,37	18.280	18.547
Liabilitas tidak lancar lainnya		386	240
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		65.158	63.274
JUMLAH LIABILITAS		**167.390**	**137.222**
EKUITAS			
Modal saham	21	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.321	2.310
Modal saham yang diperoleh kembali	1c	(1.510)	(30)
Komponen ekuitas lainnya	22	10.754	10.259
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	29	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		85.864	97.856
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		117.719	130.685
Kepentingan nonpengendali	20	16.750	19.852
JUMLAH EKUITAS		**134.469**	**150.537**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**301.859**	**287.759**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2026 (Tidak diaudit/disajikan kembali)	2025
PENDAPATAN	23,33	**75.878**	**72.878**
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	25,32	(21.474)	(19.674)
Beban penyusutan dan amortisasi	11,12a,14,2z.iii	(17.203)	(16.818)
Beban karyawan	24	(7.583)	(8.028)
Beban interkoneksi	32	(3.788)	(4.195)
Beban umum dan administrasi	26,32	(3.669)	(3.342)
Beban pemasaran	32	(1.765)	(1.531)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	(1.236)	(276)
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	1e	550	-
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih		(617)	127
Laba selisih kurs - bersih		282	30
LABA USAHA		**19.375**	**19.171**
Penghasilan pendanaan - bersih	32	745	887
Biaya pendanaan	32	(2.079)	(2.647)
Bagian rugi investasi jangka panjang pada entitas asosiasi		(1)	(4)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**18.040**	**17.407**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	27d		
Pajak kini		(4.731)	(4.122)
Pajak tangguhan	2z.iii	265	830
		(4.466)	(3.292)
LABA PERIODE BERJALAN		**13.574**	**14.115**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Selisih kurs penjabaran	22	495	128
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Laba (rugi) aktuaria program manfaat pasti - bersih	30	238	(4)
Penghasilan komprehensif lain - bersih		733	124
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		**14.307**	**14.239**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		9.956	10.783
Kepentingan nonpengendali	20	3.618	3.332
		13.574	**14.115**
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		10.502	10.907
Kepentingan nonpengendali		3.805	3.332
		14.307	**14.239**
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	28		
Laba bersih per saham		100,75	108,85
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		10.075,31	10.885,09

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
						Saldo laba				
		Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum Ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
Saldo, 1 Januari 2026		**4.953**	**2.310**	**(30)**	**10.259**	**15.337**	**97.856**	**130.685**	**19.852**	**150.537**
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	11	-	-	-	-	11	7	18
Dividen kas	29	-	-	-	-	-	(21.999)	(21.999)	(6.566)	(28.565)
Modal saham yang diperoleh kembali	1c,1e	-	-	(1.480)	-	-	-	(1.480)	(348)	(1.828)
Laba periode berjalan	20	-	-	-	-	-	9.956	9.956	3.618	13.574
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	-	495	-	51	546	187	733
Saldo, 30 Juni 2026 (disajikan kembali, Catatan 2z & 40)		**4.953**	**2.321**	**(1.510)**	**10.754**	**15.337**	**85.864**	**117.719**	**16.750**	**134.469**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
						Saldo laba				
		Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum Ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
Saldo, 1 Januari 2025		**4.953**	**2.310**	**-**	**9.898**	**15.337**	**101.310**	**133.808**	**20.396**	**154.204**
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	15	15
Dividen kas	29	-	-	-	-	-	(21.047)	(21.047)	(7.341)	(28.388)
Modal saham yang diperoleh kembali	1c	-	-	(5)	-	-	-	(5)	-	(5)
Laba periode berjalan	20	-	-	-	-	-	10.783	10.783	3.332	14.115
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	-	128	-	(4)	124	-	124
Saldo, 30 Juni 2025 (disajikan kembali, Catatan 2z & 40)		**4.953**	**2.310**	**(5)**	**10.026**	**15.337**	**91.042**	**123.663**	**16.402**	**140.065**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2026	2025
		Tidak diaudit/disajikan kembali)	
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		74.223	71.204
Penerimaan dari pendapatan bunga		731	908
Penerimaan restitusi pajak		268	935
Pembayaran kas untuk beban		(23.951)	(22.936)
Pembayaran kas kepada karyawan		(9.821)	(8.286)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(3.383)	(4.466)
Pembayaran beban bunga		(2.092)	(2.647)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	12a	(1.748)	(1.750)
Penerimaan (pembayaran) pajak pertambahan nilai - bersih		903	(899)
(Pembayaran) penerimaan kas lainnya - bersih		(268)	510
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		**34.862**	**32.573**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari pelepasan entitas anak	1e	855	-
Hasil dari pelepasan investasi pada instrumen keuangan	10	314	890
Hasil dari penjualan aset tetap	11	62	1
Hasil dari klaim asuransi	11	3	114
Pembelian aset tetap	11,39	(9.879)	(9.915)
Pembelian aset takberwujud	14,39	(1.489)	(1.632)
Penempatan pada aset keuangan lancar lainnya - bersih		(588)	(181)
Pembayaran uang muka dan aset lainnya		(111)	(528)
Pengurangan kas atas hilangnya pengendalian entitas anak	40	(2)	-
Penambahan investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		-	(209)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		**(10.835)**	**(11.460)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	34.080	39.689
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	(27.964)	(31.686)
Pembayaran liabilitas sewa	39	(4.338)	(3.648)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(4.307)	(5.223)
Pembelian kembali saham Perusahaan	1c	(1.480)	(5)
Pembelian kembali saham entitas anak	1e	(348)	-
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	29	-	(21.047)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		**(4.357)**	**(21.920)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**19.670**	**(807)**
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		**680**	**88**
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		**(1)**	**(1)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	**34.228**	**33.905**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	**54.577**	**33.185**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah").

Perusahaan merupakan badan usaha milik negara berbentuk Persero, yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui hak yang melekat pada saham Seri A Dwiwarna dan Seri B yang masing-masing dimiliki oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara") (Catatan 21).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan penyesuaian klausul Anggaran Dasar Perusahaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 07 tanggal 6 Januari 2026, telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ("Menkum") berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-AH.01.030033590 Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang secara umum meliputi:

i. Usaha utama:
   (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
   (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
   (c) Melakukan investasi, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

ii. Usaha penunjang:
   (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
   (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
   (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, dan komunikasi dan teknologi lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, dengan alamat di Jalan Japati No. 1, Bandung.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital ("Menkomdigi"), sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut di atas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPI"), sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi, seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal. Sementara, untuk jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, dan jasa akses internet, terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan, seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan bruto.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/ 12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/ 16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/ 2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	046/KEP/M.KOMINFO/ 02/2020	Jaringan sistem komunikasi data	3 Agustus 2020
Izin penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	Izin Bank Indonesia 23/587/DKSP/Srt/B	Penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	1 Juli 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	073/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	23 Agustus 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	082/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap sambungan internasional	8 Oktober 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	094/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap tertutup	9 Desember 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*	095/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* dan *packet switched*	9 Desember 2021

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary,* Audit Internal, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang masing-masing dinyatakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 3 Juli 2026 dan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 97 tanggal 23 Desember 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Komisaris Utama	Angga Raka Prabowo	Angga Raka Prabowo
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Ira Noviarti	Ira Noviarti
Komisaris Independen	Deswandhy Agusman	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	Anthony Leong	-
Komisaris	Ossy Dermawan	Ossy Dermawan
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah	Rionald Silaban
Komisaris	-	Silmy Karim
Direktur Utama*	Dian Siswarini	Dian Siswarini
Direktur *Enterprise & Business Service*	Veranita Yosephine	Veranita Yosephine
Direktur *Human Capital Management*	Willy Saelan	Willy Saelan
Direktur *IT Digital**	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Arthur Angelo Syailendra	Arthur Angelo Syailendra
Direktur *Legal* & *Compliance*	Andy Kelana	Andy Kelana
Direktur *Network**	Nanang Hendarno	Nanang Hendarno
Direktur *Strategic Business Development & Portfolio*	Seno Soemadji	Seno Soemadji
Direktur *Wholesale & International Service**	Budi Satria Dharma Purba	Budi Satria Dharma Purba

*Berdasarkan keputusan yang dibuat pada RUPSLB yang dinyatakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 30 September 2026, Bapak Nanang Hendarno ditunjuk sebagai Direktur Utama, Bapak Kharim Indra G. Siregar ditunjuk sebagai Direktur *IT Digital,* Bapak Budi Satria Dharma Purba ditunjuk sebagai Direktur *Network*, Bapak Radita Ali Putra ditunjuk sebagai Direktur *Wholesale & International Service*.

ii. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Audit Internal

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Audit Internal Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Ketua	Deswandhy Agusman	Deswandhy Agusman
Anggota	Ira Noviarti	Ira Noviarti
Anggota	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota	Anthony Leong	-
Anggota	Achmad Taufik	Achmad Taufik
Anggota	Irhoan Tanudiredja	Irhoan Tanudiredja
*Corporate Secretary**	Edie Kurniawan	Jati Widagdo
Audit Internal**	Afdol Muftiasa	Mohamad Ramzy

*Berdasarkan Surat Pemberitahuan Direktur Legal & Compliance No. Tel.07/LP 000/COP-B0000000/2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemberitahuan Pergantian Sekretaris Perusahaan, terhitung sejak 23 Juni 2026, Bapak Jati Widagdo tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan dan Bapak Edie Kurniawan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Direktur Legal & Compliance No. Tel.08/LP 000/COP-B0000000/2026, Bapak Edie Kurniawan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak 1 Juli 2026.

**Berdasarkan Surat Pemberitahuan SVP Corporate Secretary No. Tel.91/LP 000/COP-M0000000/2026 tanggal 2 Oktober 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Deni Ratno Tama ditunjuk sebagai Kepala Unit Audit Internal definitif, efektif sejak 1 Oktober 2026.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary,* Audit Internal, dan Karyawan (lanjutan)

iii. Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan dan entitas anak (secara kolektif disebut "Grup") masing-masing memiliki 17.438 karyawan dan 19.082 karyawan (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000 saham, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamendemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham treasuri yang diakuisisi dalam tahap III. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B. Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo (“TSE”) dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasuri tahap III.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasuri tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 15 Mei 2018, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali sejumlah 1.737.779.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan, dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp5.040 miliar menjadi sebesar Rp4.953 miliar. Dengan demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST telah disetujui pengurangan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp20.000 miliar menjadi sebesar Rp19.500 miliar, sehingga jumlah modal saham dasar Perusahaan menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 389.999.999.999 saham Seri B.

Berdasarkan Risalah RUPS oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 52 tanggal 27 Mei 2025, RUPS menyetujui program pembelian kembali saham Perusahaan dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp3.000 miliar. Selanjutnya, berdasarkan Risalah RUPS oleh Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 8 Juni 2026, RUPS menyetujui program pembelian kembali saham Perusahaan dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp4.000 miliar. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 481.275.800 lembar atau sebesar Rp1.510 miliar (Catatan 21).

Pada tanggal 30 Juni 2026, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 62.240.187,80 ADS atau setara dengan 6.224.018.780 lembar saham Seri B telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 21).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun, dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan masing-masing telah dicatatkan di BEI (Catatan 19a).

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2026	31 Desember 2025	30 Juni 2026	31 Desember 2025
PT Telekomunikasi Selular (“**Telkomsel**”)	Jasa jaringan, layanan telekomunikasi seluler, *fixed broadband,* dan *internet protocol television* (“IPTV”)	1995	70	70	110.498	114.627
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“**Mitratel**”)	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa penunjang digital untuk *mobile infrastructure*	1995	72	72	60.106	58.350
PT Telkom Infrastruktur Indonesia (“**TIF**”)	Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi	2024	100	100	48.809	3.944
PT Telekomunikasi Indonesia International (**“Telin”**)	Jasa telekomunikasi dan informasi internasional	1995	100	100	20.476	19.540
PT Multimedia Nusantara (“**Metra**”)	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia	1998	100	100	17.576	17.287
PT Telkom Data Ekosistem (“**TDE**”)	*Data center*	1996	100	100	10.025	9.924
PT Telkom Satelit Indonesia (“**Telkomsat**”)	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait	1996	100	100	7.902	8.245
PT Graha Sarana Duta (“**GSD**”)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat	1982	100	100	5.183	5.197
PT Sigma Cipta Caraka (“**Sigma**”)	Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer	1988	100	100	4.818	5.416
PT Telkom Akses (“**Telkom Akses**”)	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2013	100	100	3.601	4.244
PT Metra-Net (“**Metra-Net**”)	Jasa portal multimedia	2009	100	100	2.353	1.883
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (“**Telkom Infra**”)	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2014	100	100	1.115	1.226
PT PINS Indonesia (“**PINS**”)	Perdagangan perangkat telekomunikasi	1995	100	100	481	550
PT Napsindo Primatel Internasional (“**Napsindo**”)	Telekomunikasi - menyediakan *Network*, *Access Point* (“NAP”), *Voice Over Data* (“VOD”), dan jasa terkait lainnya	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
Semua entitas anak dengan kepemilikan langsung berdomisili di Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2026	31 Desember 2025	30 Juni 2026	31 Desember 2025
PT Metra Digital Investama Ventura (**"MDI"**)	Jasa perdagangan, informasi dan teknologi multimedia, hiburan, dan jasa investasi	2013	100	100	9.057	9.054
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. ("**Telin Singapore**"), *berdomisili di Singapura*	Telekomunikasi dan jasa terkait	2008	100	100	7.844	7.102
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("**Telin Hong Kong**"), *berdomisili di Hong Kong*	Pengelolaan investasi dan layanan telekomunikasi	2010	100	100	4.154	3.530
NeutraDC Singapore Pte. Ltd. (**"NeutraDC Singapore"**) *berdomisili di Singapura*	*Data center*	2024	100	100	2.605	2.379
PT Teknologi Data Infrastruktur (**"TDI"**)	Jasa telekomunikasi dan *data center*	2013	60	60	2.384	2.261
PT Telkom Landmark Tower ("**TLT**")	Jasa pengembangan dan manajemen properti	2012	55	55	2.239	2.148
PT Nuon Digital Indonesia (**"Nuon"**)	Jasa penjualan konten digital	2010	100	100	2.124	1.412
PT Infomedia Nusantara ("**Infomedia**")	Jasa layanan informasi, *contact center* dan *content directory*	1984	100	100	2.085	1.979
PT Persada Sokka Tama (**"PST"**)	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya	2008	100	100	1.644	1.753
PT Finnet Indonesia ("**Finnet**")	Jasa teknologi informatika	2006	60	60	1.493	1.450
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A. ("**Telkomcel**"), *berdomisili di Timor Leste*	Jaringan telekomunikasi, *mobile*, internet, dan data	2012	100	100	1.316	1.297
PT Telkomsel Mitra Inovasi (**"TMI"**)	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi	2019	100	100	1.002	1.014
PT Metra Digital Media ("**MD Media**")	Jasa informasi telekomunikasi dan informasi lainnya	2013	100	100	994	859

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2026	31 Desember 2025	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Telekomunikasi Indonesia International (USA) Inc. (“**Telin USA**”), *berdomisili di Amerika Serikat*	Jasa telekomunikasi dan informasi	2014	100	100	524	392
PT Digital Aplikasi Solusi (“**Digiserve**”)	Jasa sistem komunikasi	2014	100	100	476	507
PT Swadharma Sarana Informatika (“**SSI**”)	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan Anjungan Tunai Mandiri (“ATM”)	2001	51	51	405	388
PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (“**UMT**”)	Jasa sarana-prasarana jaringan telekomunikasi	2019	100	100	377	430
PT Collega Inti Pratama (“**CIP**”)	Perdagangan dan jasa	2001	70	70	291	195
PT Nusantara Sukses Investasi (**“NSI”**)	Perdagangan dan jasa	2014	100	100	289	286
PT Graha Yasa Selaras (**“GYS”**)	Jasa pariwisata dan perhotelan	2012	51	51	277	261
PT Telkomsel Ekosistem Digital (**“TED”**)	Jasa konsultasi manajemen bisnis dan investasi, dan/atau penyertaan modal pada perusahaan lain	2021	100	100	262	304
PT Metra TV (“**Metra TV**”)	Jasa penyiaran berlangganan	2013	100	100	252	255
TS Global Network Sdn. Bhd. (**“TSGN”**), *berdomisili di Malaysia*	Jasa satelit	1996	70	70	227	210
PT Nutech Integrasi (**“Nutech”**)	Jasa penyedia sistem integrator	2001	60	60	178	244
PT Graha Telkomsigma (“**GTS**”)	Jasa pengelolaan dan konsultasi	1999	100	100	164	163
Telekomunikasi Indonesia International (Malaysia) Sdn. Bhd. (**“Telin Malaysia”**), *berdomisili di Malaysia*	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	70	70	160	152
Telekomunikasi Indonesia International (Australia) Pty. Ltd. (“**Telin Australia**”), *berdomisili di Australia*	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	100	100	69	58

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2026	31 Desember 2025	30 Juni 2026	31 Desember 2025
PT Metraplasa ("**Metraplasa**")	Jasa jaringan dan *e-commerce*	2012; berhenti beroperasi pada bulan Oktober 2020	60	60	28	28
PT Pojok Celebes Mandiri ("**PCM**")**	Usaha pariwisata	2008	-	100	-	52
PT Media Nusantara Data Global **("MNDG")****	Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, *data center*, dan *internet exchange*	2012	-	55	-	128

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
**Berdasarkan Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., No. 56 tanggal 22 Juni 2026, Pemegang Saham PCM memutuskan menyetujui pembubaran dan proses likuidasi PCM.
***Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara No. 370/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2026, MNDG dinyatakan pailit, sehingga Grup kehilangan pengendalian dan mendekonsolidasi MNDG sejak tanggal tersebut.
Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

e. Informasi penting lainnya

i. Mitratel

Pembelian kembali saham

Pada tanggal 18 Juli 2025, Mitratel mengumumkan rencana melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki publik, dengan jumlah maksimum 4,12% saham dari saham Mitratel yang ditempatkan dan disetor penuh. Periode pembelian kembali saham adalah 12 (dua belas) bulan dimulai dari tanggal 26 Agustus 2025 sampai tanggal 25 Agustus 2026. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Mitratel telah melakukan pembelian kembali saham masing-masing sebanyak 600.508.200 lembar saham dan 131.491.800 lembar saham, dengan nilai masing-masing sebesar Rp348 miliar dan Rp79 miliar.

Penggabungan usaha

Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Mitratel oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 150 tanggal 30 Juni 2026, pemegang saham Mitratel telah menyetujui Rencana Penggabungan Usaha PST dan UMT ke dalam Mitratel.

Penggabungan usaha tersebut berlaku efektif setelah tanggal pelaporan, sehingga transaksi tersebut tidak mempengaruhi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2026.

ii. TDI

Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 238 tanggal 22 Desember 2025, seluruh pemegang saham TDI menyetujui penerbitan 7.315.000 lembar saham baru. Atas penerbitan saham tersebut, diambil bagiannya oleh TDE sebanyak 4.620.000 lembar saham atau sebesar Rp462 miliar dan Nxera ID Pte. Ltd. sebanyak 2.695.000 lembar saham atau sebesar Rp270 miliar.

1. UMUM (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya (lanjutan)

iii. Ad Medika dan entitas anaknya

Berdasarkan Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., No. 02 dan No. 03 tanggal 2 Juni 2026, Metra telah menyelesaikan divestasi seluruh kepemilikannya pada Ad Medika kepada Global Assistance & Healthcare Singapore Pte. Ltd. Dengan efektifnya penyelesaian transaksi tersebut, Ad Medika tidak lagi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sejak tanggal efektif pelepasan pengendalian.

Ringkasan transaksi pelepasan Ad Medika adalah sebagai berikut:

Nilai transaksi pelepasan Ad Medika	857
Nilai tercatat aset neto yang dilepas	(307)
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	**550**

Kas yang diterima dari pelepasan Ad Medika sebesar Rp855 miliar (neto setelah dikurangi biaya transaksi terkait pelepasan) disajikan sebagai hasil dari pelepasan entitas anak dalam arus kas dari kegiatan investasi. Keuntungan atas pelepasan entitas anak disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

Kelompok utama aset dan liabilitas Ad Medika dan entitas anaknya pada tanggal pelepasan adalah sebagai berikut:

Aset	
Kas dan setara kas	414
Piutang usaha	265
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	114
Goodwill	82
Jumlah aset	**875**
Liabilitas	
Deposit dari pelanggan	(251)
Utang usaha	(117)
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	(174)
Jumlah liabilitas	**(542)**
Kepentingan nonpengendali	(26)
Aset neto yang dilepas	**307**

f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 November 2026.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012. Laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 telah disusun sesuai dengan PSAK 234, "Pelaporan Keuangan Interim".

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali atas entitas anak tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Dolar Singapura, dan Ringgit Malaysia.

Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah Rp1 miliar dan US$1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2026, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu:

i. Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
ii. PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2027:

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 118 memberikan persyaratan untuk penyajian subtotal laba (rugi) operasi, laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan, serta laba (rugi). Selain itu, PSAK 118 juga mensyaratkan penghasilan dan beban untuk diklasifikasikan ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, serta pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2027: (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (lanjutan)

PSAK 118 juga mengatur mengenai pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen ("UKTM") dengan tujuan mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. PSAK 118 menjelaskan mengenai peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan serta prinsip dan persyaratan mengenai agregasi dan disagregasi informasi. Prinsip tersebut berlaku baik dalam penyajian di laporan keuangan maupun dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Saat ini, Grup tengah berupaya mengidentifikasi dampak yang akan ditimbulkan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan

DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan. PSAK 119 mengatur persyaratan pengungkapan yang dapat diterapkan oleh entitas sebagai pengganti persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian, tersendiri, atau laporan keuangan individual jika dan hanya jika pada akhir periode pelaporan entitas merupakan entitas anak tanpa akuntabilitas publik di mana entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia bagi publik yang mematuhi SAK Indonesia.

Pada November 2025, DSAK IAI mengesahkan amendemen PSAK 119. Amendemen PSAK 119 ini mencakup:

i. penghapusan penerapan dalam laporan keuangan tersendiri oleh entitas induk perantara;
ii. penghapusan tujuan pengungkapan terkait pembiayaan pemasok, kekurangan ketertukaran, model Pilar Dua, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, serta liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
iii. pengurangan persyaratan pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok;
iv. penghapusan materi yang berisi panduan dan bukan persyaratan pengungkapan; dan
v. penggantian persyaratan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen dengan rujukan silang ke PSAK 118.

Amendemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi

Amendemen ini mengklarifikasi metode penjabaran ketika mata uang penyajian dari ekonomi hiperinflasi, sedangkan mata uang fungsional berasal dari ekonomi nonhiperinflasi, serta mengusulkan perlakuan akuntansi ketika mata uang penyajian entitas tidak lagi bersifat hiperinflasi. Amendemen ini mensyaratkan perlakuan akuntansi apabila mata uang fungsional dan penyajian entitas berada dalam ekonomi hiperinflasi (atau merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda) dan entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya dengan mata uang fungsional nonhiperinflasi. Amendemen ini memberikan pengungkapan tambahan sebagai konsekuensi dari perubahan metode penjabaran.

Amendemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah Grup memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

i. pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*;
ii. hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
iii. hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, dan arus kas atas transaksi antar-Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

i. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
ii. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
iii. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
iv. mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; dan
v. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada Grup.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personel manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 109, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 109 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill (lanjutan)*

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Meskipun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar saat tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan *(pooling-of-interests).*

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Tambahan Modal Disetor” pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 338, seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun “Tambahan Modal Disetor” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas di bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Persediaan

Persediaan terdiri dari kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM") dan voucer prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Biaya persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehannya.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

g. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban dibayar di muka disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

h. Aset tidak lancar tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset (atau kelompok lepasan) berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin (*highly probable*).

Aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (apabila ada). Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Grup mengestimasi nilai terpulihkan dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi jumlah terpulihkan, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill*, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	Tahun
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	3-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan; (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan; dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	10-50
Renovasi bangunan sewa	3-10
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-40
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	4-20
Jaringan kabel	3-25
Drop cable	5
Catu daya	4-25
Peralatan pengolahan data	4-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	3-5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Peralatan lainnya	2-5

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter diukur pada nilai wajar, kecuali (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi ke akun aset tetap yang terkait.

Grup mengakui biaya penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut, maka entitas menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai (jika ada), hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai, dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

k. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus di mana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman dalam PSAK 116, antara lain:
- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak-guna sebagai sewa jangka pendek;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa di mana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak-guna untuk sewa di mana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 116 untuk semua kontrak sewa.

i. Grup sebagai *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun
Tanah	1-33
Bangunan	1-30
Peralatan dan instalasi transmisi	1-25
Kendaraan	1-6
Lain-lain	1-6

Jika kepemilikan aset hak-guna dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, amortisasi dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak-guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236: Penurunan Nilai Aset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental karena tingkat suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 116, *lessor* terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa di mana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada *lessor* oleh *lessee*. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh *lessee* dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 109, penyisihan kerugian kredit ekspektasian telah diakui sebagai piutang sewa dan disajikan sebagai “Piutang lain-lain” (Catatan 8).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

ii. Grup sebagai *lessor* (lanjutan)

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan nonsewa, Grup menerapkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, untuk mengalokasikan imbalan dalam kontrak. Pendapatan yang timbul dari sewa operasi dicatat sebagai Pendapatan dari transaksi *lessor* (Catatan 2o).

l. Beban tangguhan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

m. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

n. Penjabaran valuta asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tengah *Reuters* yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Pound Inggris (“GBP”) 1	23.654	23.674	22.386	22.401
Dolar A.S. (“US$”) 1	17.876	17.886	16.672	16.681
Dolar Australia (“AU$”) 1	12.305	12.316	11.136	11.149
Dolar Singapura (“SGD”) 1	13.804	13.819	12.960	12.969
Dolar Taiwan Baru (“TWD”) 1	561,10	561,94	530,38	531,21
Euro (“EUR”) 1	20.367	20.380	19.541	19.556
Yen Jepang (“JPY”) 1	110,13	110,22	106,45	106,52
Ringgit Malaysia (“MYR”) 1	4.378	4.387	4.101	4.111
Dolar Hong Kong (“HKD”) 1	2.279	2.281	2.142	2.143
Kyat Myanmar (“MMK”) 1	8,49	8,54	7,91	7,97

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Penjabaran valuta asing (lanjutan)

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, di mana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2j).

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 115 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. Data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan piranti keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang dan/atau jasa kepada pelanggan atau instalasi perangkat. Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel/solusi, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket bundel/solusi yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

ii. IndiHome

Pendapatan dari layanan IndiHome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau paket layanan bundel kombinasi layanan *consumer* (misalnya telepon, internet dan data, serta TV berbayar). Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Grup menerapkan syarat dan ketentuan yang mengharuskan pelanggan untuk membayar denda pengakhiran yang substantif apabila kontrak berlangganan berakhir atas permintaan dan/atau kesalahan pelanggan dalam 12 bulan pertama setelah layanan aktif. Setelah periode 12 bulan pertama, pelanggan dapat memutuskan untuk berhenti berlangganan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa dikenakan denda. Sesuai ketentuan PSAK 115, periode kontrak adalah 12 bulan, dan selanjutnya dapat diperbarui sebagai kontrak bulanan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

ii. IndiHome (lanjutan)

Seluruh layanan IndiHome diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menangguhkan nilai tersebut sebagai liabilitas kontrak dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. Interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk), panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit), dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

iv. SMS, telepon tidak bergerak, dan seluler

Layanan ditawarkan secara pascabayar atau prabayar. Untuk layanan prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucer perdana) dan voucer isi ulang pada awalnya diakui sebagai liabilitas kontrak. Grup mengakui aset kontrak untuk penyediaan jasa dari pelanggan pascabayar yang belum ditagih.

Seluruh pendapatan layanan tersebut diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket bundel yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi yang terjual dan jumlah poin yang dikeluarkan, dengan nilai yang dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan saat poin tersebut ditukarkan, berakhir masa berlakunya, atau pada saat program tersebut dihapus.

v. Jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan transponder satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan. Pendapatan dari perangkat atau jasa telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Aset kontrak

Aset kontrak awalnya diakui dari pendapatan atas pengalihan barang atau jasa karena penerimaan imbalan masih bersyarat tahapan tertentu atau setelah penyelesaian proyek. Setelah penyelesaian syarat tahapan tertentu atau proyek, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak tunduk pada penilaian penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi tentang penurunan nilai aset keuangan di bagian 2.r.i. Instrumen keuangan - pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan ketika Grup melaksanakan kewajiban dalam kontrak (misalnya mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan).

Biaya inkremental untuk mendapatkan dan biaya memenuhi kontrak

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai biaya kontrak. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk dan jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Setiap akhir tahun pelaporan, Grup melakukan evaluasi apakah terdapat indikasi bahwa biaya kontrak yang dikapitalisasi mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat biaya kontrak melebihi nilai yang diharapkan diterima dari pertukaran barang dan jasa. Ketika terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa operasi atas menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

p. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pascakerja lainnya, program imbalan kesehatan pascakerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan pascakerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pascakerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:
(a) ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi; dan
(b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, di mana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan program imbalan pasti, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

iii. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi yang dicatat sebagai biaya karyawan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

q. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas di mana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui di luar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
ii. piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

ISAK 123: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: Pajak Penghasilan. Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari “Penghasilan lain-lain - bersih”.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan/atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 115.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payments of Principal and Interest* ("SPPI") *testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

(c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi investasi jangka panjang pada instrumen keuangan.

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari apa pun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan konsolidasian diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi jangka panjang pada instrumen keuangan dan aset keuangan lancar lainnya.

Kerugian kredit ekspektasian

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa umurnya, terlepas dari waktu gagal bayar (sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking)* yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi gagal bayar ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan peningkatan kualitas kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan utang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, deposit dari pelanggan, pinjaman, dan liabilitas sewa. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, obligasi, dan utang bank jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 109 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 19.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:
(i) situasi bisnis yang normal;
(ii) peristiwa *default*; dan
(iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh risiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

s. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai “Modal Saham yang Diperoleh Kembali” dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Grup. Selisih antara nilai tercatat dan nilai yang diperoleh kembali dari penjualan kembali saham treasuri di masa mendatang, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam ekuitas.

t. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

u. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

v. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan PSAK 108: Segmen Operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (“PKO”) Grup, misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang merugi diakui ketika kontrak tersebut menjadi merugi sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

x. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai aset. Aset tersebut meliputi aset tetap, aset lancar, dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset takberwujud. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan sebagai lancar bila:
i. akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
ii. untuk diperdagangkan;
iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
iv. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai lancar bila:
i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
ii. untuk diperdagangkan;
iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
iv. tidak ada hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup menggunakan pendekatan berbasis *business pillars* sebagai berikut: *Business to Customer* (“B2C”), *Business to Business Infrastructure* (“B2B Infra”), *Business to Business ICT* (“B2B ICT”), Internasional, dan Lain-lain. Grup telah menentukan segmen dilaporkan berdasarkan, antara lain, struktur organisasi serta komponen dari Grup yang hasil operasinya secara reguler direviu oleh PKO. Grup juga telah menentukan Direksi sebagai PKO karena Direksi memonitor hasil operasi masing-masing segmen secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan atas alokasi sumber daya dan penilaian kinerja.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

i. Pertimbangan (lanjutan)

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan memengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan memengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pascakerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 30 dan 31.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Pada tahun 2025, Perusahaan menetapkan perubahan estimasi umur manfaat untuk beberapa aset yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:

Kelompok aset tetap	Kelas aset	Estimasi umur manfaat (tahun)	Perubahan estimasi umur manfaat (tahun)
Jaringan kabel	*Optical Line Terminal*	25	8
Peralatan sentral telepon	Sentral telepon	10-15	5-10
Peralatan dan instalasi transmisi	Transmisi terestrial	10-15	8
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	IP *Multimedia Subsystem* (“IMS”)	10-15	8

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang memengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha dan aset kontrak. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Untuk piutang lain-lain, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang lain-lain mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan.

Grup telah membentuk metodologi terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha dan aset kontrak yang didasarkan pada data historis kerugian kredit dan informasi terkini yang lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbarui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, terdukung, dan tersedia.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, data, dan jasa teknologi informatika.

(ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat memengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 236.

(g) Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Ketika nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak dapat diukur pada harga kuotasian di pasar aktif, nilai wajar diukur menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas diskonto. Input atas model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi apabila memungkinkan, namun apabila tidak tersedia, sejumlah pertimbangan diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan mencakup input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

(h) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset takberwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

iii. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tahun 2025, setelah dilakukan penelaahan mendalam atas karakteristik fisik, penerapan operasional, dan topologi aset *drop cable*, Grup menyimpulkan bahwa *drop cable* perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai komponen terpisah dari aset infrastruktur telekomunikasi dan tidak lagi digabungkan dalam komponen kabel jaringan akses utama. Dalam mencapai kesimpulan tersebut, Grup menilai bahwa kebijakan komponenisasi yang direvisi memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan karena lebih mencerminkan sifat penggunaan yang spesifik terhadap pelanggan (*customer-specific/last mile asset*).

Perubahan ini memenuhi definisi perubahan kebijakan akuntansi karena mencerminkan perubahan dalam prinsip dan dasar yang digunakan dalam penentuan *unit of measure* dan klasifikasi aset. Seiring dengan pemisahan tersebut, Grup menetapkan umur manfaat aset *drop cable* secara tersendiri selama 5 tahun, yang mencerminkan karakteristik dan pola konsumsi manfaat ekonominya.

Grup menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela (*voluntary change*) ini secara retrospektif sesuai dengan ketentuan PSAK 208. Grup menilai bahwa informasi yang diperlukan untuk melakukan penyajian kembali periode komparatif tersedia dan dapat diandalkan. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah disesuaikan untuk mencerminkan penerapan atas perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Catatan 40).

3. KAS DAN SETARA KAS

		30 Juni 2026		31 Desember 2025	
		Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	51	-	39
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	7.590	-	4.959
	US$	233	4.161	240	4.007
	TWD	1	1	4	2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	8.433	-	5.780
	US$	49	874	34	567
	EUR	2	45	2	44
	HKD	2	5	3	7
	AU$	0	2	0	1
	JPY	6	1	6	1
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	Rp	-	6.226	-	2.925
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	4.011	-	2.785
	US$	49	883	39	652
	GBP	0	1	0	1
	EUR	0	0	0	0
	SGD	0	0	0	0
	AU$	0	0	0	0
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Rp	-	149	-	71
	US$	0	0	0	0
Lain-lain	Rp	-	27	-	1
Sub-jumlah			32.409		21.803
Pihak ketiga					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	Rp	-	1.260	-	839
	US$	0	0	-	-
	MYR	2	8	1	4
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hong Kong")	US$	29	522	22	364
	HKD	30	69	12	27
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	11	-	2
	US$	1	16	1	24
	SGD	19	261	2	23
	MYR	0	1	1	3
	MMK	14	0	15	0
DBS Bank (Hong Kong) Ltd. ("DBS Hong Kong")	US$	13	238	10	165
	HKD	0	1	0	1
Standard Chartered Bank ("SCB")	US$	4	79	8	135
	SGD	8	112	12	160
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC Indonesia")	Rp	-	172	-	15
	US$	0	0	0	0
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp	-	123	-	95
	US$	0	2	0	2
	EUR	0	0	0	0
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	292	-	502
	US$	10	173	19	306
	TWD	35	20	34	18
	AU$	0	1	0	2
	EUR	0	1	0	2
	SGD	0	0	-	-
	MYR	0	0	-	-
	MMK	0	0	-	-
	HKD	0	0	0	0
Sub-jumlah			3.362		2.689
Jumlah bank			35.771		24.492
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BSI	Rp	-	4.584	-	1.150
BNI	Rp	-	1.863	-	497
	US$	24	429	34	567
BTN	Rp	-	2.202	-	1.530
	US$	3	54	-	-
BRI	Rp	-	1.439	-	1.159
	US$	17	307	10	168
Bank Mandiri	Rp	-	974	-	190
	US$	15	268	10	167
Sub-jumlah			12.120		5.428

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

		30 Juni 2026		31 Desember 2025	
		Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	807	-	58
	US$	29	517	22	367
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	-	1.312	-	804
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	498	-	433
	US$	40	710	38	637
PT Bank Danamon Tbk ("Bank Danamon")	Rp	-	1.191	-	89
UOB Indonesia	US$	25	439	16	274
	SGD	8	115	3	44
Maybank	Rp	-	533	-	99
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCB Indonesia")	Rp	-	54	-	184
	US$	7	126	13	209
SCB	US$	10	179	7	117
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	127	-	927
	US$	1	13	1	13
	MYR	4	15	4	15
Sub-jumlah			6.636		4.270
Jumlah deposito berjangka			18.756		9.698
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(1)		(1)
Jumlah			**54.577**		**34.228**

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rupiah	0,50%-6,60%	0,53%-7,08%
Mata uang asing	1,01%-5,00%	1,01%-5,25%

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kas pada bank milik negara (pihak berelasi) yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang baik. Berdasarkan penilaian manajemen atas risiko kredit ekspektasian, tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sehingga penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset tersebut tidak material.

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	30 Juni 2026 Saldo Mata uang asing (dalam jutaan)	30 Juni 2026 Saldo Setara Rupiah	31 Desember 2025 Saldo Mata uang asing (dalam jutaan)	31 Desember 2025 Saldo Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	121	-	50
	US$	26	464	5	84
Bank Mandiri	Rp	-	133	-	-
	US$	5	89	5	84
BSI	Rp	-	120	-	120
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	80	-	100
Pihak ketiga					
United Overseas Bank Limited Singapore ("UOB Singapore")	US$	32	571	33	554
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited ("SCB Singapore")	US$	11	196	6	101
Lain-lain	Rp	-	0	-	10
Jumlah deposito berjangka			1.774		1.103
Rekening penampungan					
Pihak berelasi					
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	20	-	106
	US$	0	3	0	4
Pihak ketiga					
Lain-lain	Rp	-	6	-	1
	US$	4	75	4	67
Jumlah rekening penampungan			104		178
Reksa dana					
Pihak berelasi					
Lain-lain	Rp	-	89	-	94
Jumlah reksa dana			89		94
Lain-lain	Rp	-	41	-	44
	MYR	-	-	0	1
Jumlah lain-lain			41		45
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(0)		(0)
Jumlah			**2.008**		**1.420**

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rupiah	2,50%-5,50%	3,00%-6,50%
Mata uang asing	3,49%-4,00%	3,75%-4,45%

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	1.617	1.702
PT Indosat Tbk ("Indosat")	913	906
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa")	386	387
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	124	134
Jumlah	3.040	3.129
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.029)	(1.089)
Jumlah bersih	**2.011**	**2.040**

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pelanggan individual dan bisnis	14.635	13.758
Penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri	1.509	1.291
Jumlah	16.144	15.049
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(6.399)	(5.866)
Jumlah bersih	**9.745**	**9.183**

b. Berdasarkan umur

	30 Juni 2026			31 Desember 2025		
	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	6.689	476	7,1%	6.687	263	3,9%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	4.241	545	12,9%	3.155	414	13,1%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.447	423	29,2%	1.573	454	28,9%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	6.807	5.984	87,9%	6.763	5.824	86,1%
Jumlah	**19.184**	**7.428**		**18.178**	**6.955**	

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp5.543 miliar dan Rp4.799 miliar. Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan historis tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rupiah	16.629	15.554
Dolar A.S.	2.310	2.423
Dolar Singapura	176	156
Lain-lain	69	45
Jumlah	19.184	18.178
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.428)	(6.955)
Jumlah bersih	**11.756**	**11.223**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo awal	6.955	6.064
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	1.190	1.465
Penghapusbukuan piutang	(717)	(574)
Saldo akhir	**7.428**	**6.955**

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, piutang usaha tertentu atas entitas anak masing-masing sebesar Rp2.531 miliar dan Rp3.131 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19b).

6. ASET KONTRAK

Rincian dari aset kontrak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset kontrak	2.755	2.529
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(132)	(130)
Jumlah bersih	2.623	2.399
Lancar	**(2.496)**	**(2.290)**
Tidak Lancar	**127**	**109**

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset kontrak sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih, terdiri atas:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kartu SIM dan voucer prabayar	394	457
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	454	504
Jumlah	848	961
Provisi atas persediaan usang	(60)	(60)
Jumlah bersih	**788**	**901**

Manajemen berpendapat saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban termasuk dalam beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp275 miliar dan Rp262 miliar (Catatan 25).

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tidak ada persediaan yang dijaminkan dalam perjanjian pinjaman.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	3.649	6.245
Uang muka	532	511
Gaji dibayar di muka	361	178
Piutang lain-lain	271	173
Sewa dibayar di muka	185	162
Beban ditangguhkan *indefeasible rights-of-use* ("IRU") - bagian jangka pendek	142	139
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	866	634
Jumlah	**6.006**	**8.042**

9. BIAYA KONTRAK

Mutasi biaya kontrak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2026 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2026	1.686	616	2.302
Penambahan selama periode berjalan	233	504	737
Amortisasi selama periode berjalan	(415)	-	(415)
Beban selama periode berjalan	-	(340)	(340)
Saldo, 30 Juni 2026	1.504	780	2.284
Lancar	**(470)**	**(362)**	**(832)**
Tidak lancar	**1.034**	**418**	**1.452**

	31 Desember 2025		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2025	1.666	1.064	2.730
Penambahan selama tahun berjalan	519	323	842
Amortisasi selama tahun berjalan	(499)	-	(499)
Beban selama tahun berjalan	-	(763)	(763)
Penurunan nilai	-	(8)	(8)
Saldo, 31 Desember 2025	1.686	616	2.302
Lancar	**(472)**	**(460)**	**(932)**
Tidak lancar	**1.214**	**156**	**1.370**

10. INVESTASI JANGKA PANJANG

Rincian dari investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Instrumen keuangan		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:		
Ekuitas	5.460	6.901
Obligasi konversi	244	353
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:		
Ekuitas	27	27
Sub-jumlah	5.731	7.281
Entitas asosiasi		
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin")	105	106
Sub-jumlah	105	106
Jumlah investasi jangka panjang	**5.836**	**7.387**

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk saham pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Grup tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan *start-up* tersebut.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk investasi pada:

(i) Investasi Telkomsel pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("GOTO").

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GOTO menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GOTO masing-masing sebesar Rp50 per saham dan Rp58 per saham. Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GOTO untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp332 miliar dan Rp285 miliar. Nilai ini disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

(ii) Investasi MDI pada berbagai perusahaan *start-up*.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, tidak terdapat penambahan investasi MDI, sedangkan terdapat pengurangan investasi MDI sebesar Rp276 miliar. Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi MDI (termasuk investasi pada obligasi konversi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp902 miliar (terdiri dari kerugian atas investasi ekuitas sebesar Rp794 miliar dan obligasi konversi sebesar Rp108 miliar). Nilai ini disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Rincian informasi terkait teknik valuasi nilai wajar level 1 dan level 3 diungkapkan dalam Catatan 37.

Investasi pada obligasi konversi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh MDI dan Telkomsel dalam bentuk obligasi konversi pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Obligasi konversi ini memberikan opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi obligasi menjadi saham pada saat jatuh tempo, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Dalam hal opsi konversi tidak digunakan, pemegang obligasi berhak menerima pengembalian pokok obligasi.

Bagian kerugian yang tidak diakui dari investasi di asosiasi yang diperhitungkan berdasarkan metode ekuitas, pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp334 miliar dan Rp338 miliar.

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 Juni 2026
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.995	3	(40)	7	1.965
Bangunan	21.963	14	(14)	397	22.360
Renovasi bangunan sewa	1.901	5	(10)	153	2.049
Peralatan sentral telepon	19.700	62	(79)	539	20.222
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	2	-	-	-	2
Peralatan dan instalasi transmisi	186.890	585	(1.242)	4.258	190.491
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	15.107	44	-	106	15.257
Jaringan kabel	67.175	914	-	(112)	67.977
Drop cable	19.790	152	-	3	19.945
Catu daya	27.535	56	(98)	1.608	29.101
Peralatan pengolahan data	22.877	184	(614)	333	22.780
Peralatan telekomunikasi lainnya	13.274	297	(352)	-	13.219
Peralatan kantor	2.616	31	(45)	28	2.630
Kendaraan	516	-	-	(123)	393
Peralatan lainnya	71	-	-	-	71
Aset dalam pembangunan	4.011	7.101	-	(7.524)	3.588
Jumlah	405.423	9.448	(2.494)	(327)	412.050
Akumulasi penyusutan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	8.356	228	(7)	78	8.655
Renovasi bangunan sewa	1.449	71	(10)	-	1.510
Peralatan sentral telepon	14.900	848	(79)	26	15.695
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	2	-	-	-	2
Peralatan dan instalasi transmisi	114.133	5.927	(1.187)	270	119.143
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	8.481	375	-	55	8.911
Jaringan kabel	25.490	1.698	-	(2)	27.186
Drop cable	15.438	808	-	2	16.248
Catu daya	20.901	1.139	(96)	(188)	21.756
Peralatan pengolahan data	17.470	889	(598)	(62)	17.699
Peralatan telekomunikasi lainnya	10.822	580	(277)	-	11.125
Peralatan kantor	2.223	82	(44)	6	2.267
Kendaraan	265	1	-	(44)	222
Peralatan lainnya	40	1	-	-	41
Jumlah	239.970	12.647	(2.298)	141	250.460
Nilai buku bersih	**165.453**				**161.590**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2025
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.981	-	-	14	1.995
Bangunan	20.907	197	(2)	861	21.963
Renovasi bangunan sewa	1.795	5	(46)	147	1.901
Peralatan sentral telepon	19.470	285	(1.722)	1.667	19.700
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5	-	-	(3)	2
Peralatan dan instalasi transmisi	182.170	1.836	(5.178)	8.062	186.890
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	14.795	143	(202)	371	15.107
Jaringan kabel	63.471	3.505	(13)	212	67.175
Drop cable	18.104	1.686	-	-	19.790
Catu daya	25.604	483	(476)	1.924	27.535
Peralatan pengolahan data	21.940	407	(1.245)	1.775	22.877
Peralatan telekomunikasi lainnya	12.238	1.047	-	(11)	13.274
Peralatan kantor	2.719	128	(85)	(146)	2.616
Kendaraan	530	2	(5)	(11)	516
Peralatan lainnya	60	3	-	8	71
Aset dalam pembangunan	2.930	14.850	(1)	(13.768)	4.011
Jumlah	388.719	24.577	(8.975)	1.102	405.423
Akumulasi penyusutan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	7.461	701	(2)	196	8.356
Renovasi bangunan sewa	1.347	121	(46)	27	1.449
Peralatan sentral telepon	14.795	1.755	(1.717)	67	14.900
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	4	-	-	(2)	2
Peralatan dan instalasi transmisi	106.321	12.320	(5.076)	568	114.133
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	7.377	918	(203)	389	8.481
Jaringan kabel	20.531	4.944	(12)	27	25.490
Drop cable	13.497	1.941	-	-	15.438
Catu daya	18.720	2.300	(432)	313	20.901
Peralatan pengolahan data	16.532	1.837	(1.248)	349	17.470
Peralatan telekomunikasi lainnya	9.216	1.608	-	(2)	10.822
Peralatan kantor	2.284	253	(85)	(229)	2.223
Kendaraan	250	31	(5)	(11)	265
Peralatan lainnya	49	2	-	(11)	40
Jumlah	218.384	28.731	(8.826)	1.681	239.970
Nilai buku bersih	**170.335**				**165.453**

Kelompok aset tetap yang terdiri dari (1) peralatan sentral telepon; (2) peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data; (3) peralatan dan instalasi transmisi; (4) satelit, stasiun bumi, dan peralatan; (5) jaringan kabel; (6) *drop cable*; (7) catu daya; (8) peralatan pengolahan data; dan (9) peralatan telekomunikasi lainnya merupakan infrastruktur utama telekomunikasi Grup.

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2026	2025
Hasil penjualan aset tetap	62	1
Nilai buku bersih	(49)	0
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	**13**	**1**

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain

(i) Selama tahun 2025, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2025.

(ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp4 miliar dan Rp2 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 4,73% dan 4,70% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025.

(iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(iv) Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp3 miliar dan Rp114 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp8 miliar dan Rp86 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 6-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2026 sampai dengan tahun 2070. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(vi) Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar (sebelum penyesuaian dan eliminasi antar perusahaan) Rp152.106 miliar dan Rp160.374 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis. Jumlah keseluruhan pertanggungan untuk tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp42.249 miliar dan Rp44.267 miliar, HKD12 juta dan HKD35 juta, SGD139 juta dan SGD197 juta, dan MYR46 juta dan MYR46 juta. Jumlah pertanggungan *first loss basis* untuk tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp2.750 miliar dan Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

(vii) Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, tingkat perkiraan persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 50,80% dan 44,12% dari nilai kontrak atau Rp3.588 miliar dan Rp4.011 miliar sebagai jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan, dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai Februari 2027 dan Desember 2026. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel, dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(viii) Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijaminkan dalam perjanjian obligasi (Catatan 19a). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp2.180 miliar dan Rp2.205 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19b).

(ix) Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp118.694 miliar dan Rp100.603 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

(x) Pada tahun 2025, Perusahaan menetapkan perubahan estimasi umur manfaat untuk beberapa aset yang dimiliki Perusahaan (Catatan 2z.ii.(b)). Dampak penambahan beban penyusutan (sebelum penyesuaian dan eliminasi antar perusahaan) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp867 miliar. Sedangkan estimasi untuk penambahan (pengurangan) beban penyusutan untuk setidaknya 5 (lima) tahun ke depan masing-masing adalah sebesar sebagai berikut:

Tahun	Penambahan (Pengurangan)
2026	579
2027	653
2028	228
2029	(96)
2030	(381)

(xi) Di tahun 2025, Perusahaan melakukan evaluasi kondisi fisik aset dan selanjutnya melakukan percepatan depresiasi sebesar Rp1.945 miliar atas beberapa jenis aset yang diperkirakan tidak optimal lagi.

(xii) Pada tahun 2025, nilai wajar tanah dan bangunan Grup adalah sebesar Rp54.474 miliar.

(xiii) Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup menghapuskan aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp52 miliar sehubungan dengan dekonsolidasi MNDG. Selain itu, aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp44 miliar yang telah diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan rencana pelepasan Ad Medika, telah dilepaskan pada periode berjalan.

12. SEWA

a. Grup sebagai *lessee*

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, kendaraan, dan lain-lain yang digunakan dalam operasi, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 30 tahun.

Nilai tercatat aset hak-guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	Tanah	Bangunan	Peralatan dan instalasi transmisi	Kendaraan	Lain-lain	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2025	5.175	588	19.097	493	1.557	26.910
Penambahan	2.320	138	4.471	413	99	7.441
Pengurangan dan reklasifikasi	(137)	23	(603)	(12)	-	(729)
Beban penyusutan	(1.142)	(193)	(3.977)	(310)	(39)	(5.661)
Saldo, 31 Desember 2025	**6.216**	**556**	**18.988**	**584**	**1.617**	**27.961**
Penambahan	1.023	173	2.700	61	21	3.978
Pengurangan dan reklasifikasi	42	(13)	(285)	49	0	(207)
Beban penyusutan	(600)	(102)	(2.001)	(181)	(25)	(2.909)
Saldo, 30 Juni 2026	**6.681**	**614**	**19.402**	**513**	**1.613**	**28.823**

12. SEWA (lanjutan)

a. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo awal	24.137	23.959
Penambahan bunga	717	1.466
Penambahan (Catatan 39a)	3.978	7.441
Pengurangan	(4.902)	(8.729)
Saldo akhir	23.930	24.137
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	**(5.650)**	**(5.590)**
Bagian jangka panjang	**18.280**	**18.547**

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kurang dari 1 tahun	6.938	6.844
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	13.156	14.676
Lebih dari 5 tahun	8.828	7.517
Jumlah pembayaran sewa	28.922	29.037
Bunga	(4.992)	(4.900)
Nilai kini atas pembayaran sewa	23.930	24.137
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	**(5.650)**	**(5.590)**
Bagian jangka panjang	**18.280**	**18.547**

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel.

Berikut adalah beban terkait sewa yang diakui pada laba rugi:

	2026	2025
Beban penyusutan	2.909	2.776
Beban sewa jangka pendek	1.741	1.742
Beban bunga sewa	717	730
Beban sewa aset bernilai rendah	7	8

b. Grup sebagai *lessor*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 25 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2027 hingga 2039. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kurang dari 1 tahun	3.101	3.188
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	9.611	10.670
Lebih dari 5 tahun	3.947	4.701
Jumlah	**16.659**	**18.559**

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Klaim restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 27b)	2.671	3.996
Beban ditangguhkan IRU - setelah dikurangi bagian jangka pendek	1.343	1.348
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	1.004	1.201
Uang muka	786	734
Uang jaminan	230	284
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	318	310
Jumlah	**6.352**	**7.873**

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2026	1.389	23.597	725	1.714	27.425
Penambahan	-	1.282	25	2	1.309
Pengurangan	(1)	(2)	-	(2)	(5)
Reklasifikasi/translasi	-	2	5	-	7
Saldo, 30 Juni 2026	1.388	24.879	755	1.714	28.736
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2026	(475)	(16.203)	(370)	(1.140)	(18.188)
Beban amortisasi	-	(1.447)	(55)	(31)	(1.533)
Pengurangan	-	2	-	2	4
Reklasifikasi/translasi	-	(16)	(2)	1	(17)
Saldo, 30 Juni 2026	(475)	(17.664)	(427)	(1.168)	(19.734)
Nilai buku bersih	**913**	**7.215**	**328**	**546**	**9.002**

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2025	1.474	20.531	647	1.703	24.355
Penambahan	-	2.878	68	16	2.962
Pengurangan	-	(8)	(1)	(3)	(12)
Reklasifikasi/translasi	(85)	196	11	(2)	120
Saldo, 31 Desember 2025	1.389	23.597	725	1.714	27.425
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2025	(479)	(13.086)	(277)	(1.071)	(14.913)
Beban amortisasi	-	(2.906)	(94)	(72)	(3.072)
Pengurangan	-	7	-	-	7
Reklasifikasi/translasi	4	(218)	1	3	(210)
Saldo, 31 Desember 2025	(475)	(16.203)	(370)	(1.140)	(18.188)
Nilai buku bersih	**914**	**7.394**	**355**	**574**	**9.237**

(i) *Goodwill* timbul dari akuisisi oleh Mitratel, Metra-Net, Sigma, TDE, Telkomsat, dan Metra masing-masing sebesar Rp467 miliar, Rp220 miliar, Rp78 miliar, Rp77 miliar, Rp68 miliar, dan Rp3 miliar.

(ii) Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing 1-6 tahun. Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Beban penyusutan dan amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(iii) Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp11.599 miliar dan Rp10.664 miliar.

15. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	241	337
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	241	234
Sub-jumlah	**482**	**571**
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	8.440	10.006
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.978	3.123
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	1.361	2.484
Sub-jumlah	**12.779**	**15.613**
Jumlah	**13.261**	**16.184**

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Rupiah	10.302	13.476
Dolar A.S.	2.864	2.657
Lain-lain	95	51
Jumlah	**13.261**	**16.184**

Syarat dan ketentuan atas utang usaha di atas:
(i) Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
(ii) Lihat Catatan 32c untuk rincian transaksi pihak berelasi.
(iii) Lihat Catatan 37b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

Telkom Akses dan Mitratel memiliki kerjasama dengan beberapa bank dalam fasilitas pembiayaan *supply chain*. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh pemasok Telkom Akses dan Mitratel untuk memperoleh pembayaran atas tagihan yang telah disetujui untuk dibayarkan oleh bank sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, nilai tercatat liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok	178	353
Jumlah yang vendor telah terima dari penyedia pembiayaan	178	353
Rentang tanggal jatuh tempo	1-3 bulan	1-3 bulan

Tidak ada kombinasi bisnis material atau perbedaan nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi kewajiban berdasarkan pengaturan pembiayaan pemasok pada kedua periode tersebut. Tidak ada transfer non-tunai dari utang usaha ke utang bank berdasarkan pengaturan pembiayaan pemasok pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	5.561	5.459
Umum, administrasi, dan pemasaran	5.483	3.525
Gaji dan tunjangan	3.779	5.673
Beban bunga dan administrasi bank	201	210
Jumlah	**15.024**	**14.867**

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

17. LIABILITAS KONTRAK

Rincian dari liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Uang muka pelanggan B2C	3.590	3.396
Uang muka pelanggan B2B ICT	2.749	2.774
Uang muka pelanggan Internasional	872	814
Uang muka pelanggan B2B Infra	437	492
Uang muka pelanggan lain-lain	606	494
Jumlah	**8.254**	**7.970**

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Uang muka pelanggan Internasional	1.519	1.059
Uang muka pelanggan B2C	408	558
Uang muka pelanggan B2B ICT	366	581
Uang muka pelanggan lain-lain	561	653
Jumlah	**2.854**	**2.851**

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	Saldo Terutang	
Kreditur	**30 Juni 2026**	**31 Desember 2025**
Pihak berelasi		
BNI	2.544	586
BRI	1.800	100
Bank Mandiri	363	804
Sub-jumlah	4.707	1.490
Pihak ketiga		
MUFG Bank (“MUFG”)	1.755	2.805
PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)	1.799	2.100
PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)	400	420
PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Bank Maspion”)	136	95
Lain-lain	-	19
Sub-jumlah	4.090	5.439
Jumlah	**8.797**	**6.929**

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI							
2014	Sigma	Rp	150	9 Januari 2027	Bulanan	8,50%	Piutang usaha dan aset tetap
2017-2021	Infomedia, Telkom Infra	Rp	985	28 Maret 2027-6 Juni 2027	Bulanan	1 bulan IndONIA + 2,64%-2,78%	Tidak ada
2019	Metranet	Rp	150	18 Februari 2027	Bulanan	1 bulan IndONIA + 2,88%	Piutang usaha
2022	Perusahaan	Rp	2.000	26 September 2026	Bulanan	5,75%	Tidak ada
BRI							
2022-2025	Perusahaan, Finnet, Mitratel	Rp	3.500	8 September 2026-19 Maret 2027	Bulanan, Kuartalan	5,00%-7,20%	Tidak ada
Bank Mandiri							
2020	Finnet	Rp	500	28 April 2027	Bulanan	1 bulan IndONIA + 1,50%	Tidak ada
2021	Nutech	Rp	100	27 September 2026	Bulanan	9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
MUFG							
2019	Infomedia, GSD, Telkom Infra, Telkomsat	Rp	1.876	31 Juli 2026-31 Oktober 2026	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 1,22%-1,98%; 3 bulan IndONIA + 2,16%	Tidak ada
HSBC							
2019-2023	Sigma, TDE, Metranet, Telkomsat, GSD	Rp	2.004	10 Juli 2026-2 April 2027	Bulanan	1 bulan IndONIA + 1,22%	Tidak ada
2026	Mitratel	Rp	500	5 Mei 2027	Bulanan	5,89%	Tidak ada
DBS							
2018	Telkom Infra, Infomedia	Rp	600	1 Agustus 2026	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 1,2%; 3 bulan IndONIA + 1,2%	Tidak ada
Bank Maspion							
2023	Metranet	Rp	170	26 Oktober 2026	Bulanan	7,25%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal.
** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijaminkan.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap entitas anak dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk Sigma terkait *debt to service coverage ratio* yang masih lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) untuk pinjaman sebesar Rp9 miliar dari HSBC untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma. *Waiver* dari HSBC diterima pada tanggal 15 Desember 2025 dan berlaku efektif selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Utang bank	19b	20.477	17.746

Pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Obligasi	19a	2.696	2.696
Utang bank	19b	24.926	23.403
Jumlah		**27.622**	**26.099**

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

			Tahun				
	Catatan	Jumlah	2027	2028	2029	2030	Selanjutnya
Obligasi	19a	2.696	-	-	-	1.200	1.496
Utang bank	19b	24.926	3.206	6.158	5.623	4.775	5.164
Jumlah		**27.622**	**3.206**	**6.158**	**5.623**	**5.975**	**6.660**

a. Obligasi

	Saldo terutang	
Obligasi	**30 Juni 2026**	**31 Desember 2025**
Obligasi Telkom Tahun 2015		
Seri C	1.200	1.200
Seri D	1.500	1.500
Jumlah	2.700	2.700
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4)	(4)
	2.696	2.696
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	**-**	**-**
Bagian jangka panjang	**2.696**	**2.696**

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	**7.000**						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.viii). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW"), PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support,* dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2026, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah idAAA (*Triple A)*.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1;
(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1;
(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. Utang bank

		30 Juni 2026		31 Desember 2025	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Kreditur	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	13.059	-	13.155
Bank Mandiri	Rp	-	4.272	-	7.635
BSI	Rp	-	3.458	-	1.666
BRI	Rp	-	232	-	261
Sub-jumlah			21.021		22.717
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	10.347	-	7.313
DBS	Rp	-	5.917	-	4.350
Bank of China	Rp	-	1.900	-	1.900
Bank CIMB Niaga	Rp	-	1.583	-	1.750
	US$	9	157	10	173
Bank Permata	Rp	-	1.458	-	1.229
PT Bank Sinarmas Tbk (“Bank Sinarmas”)	Rp	-	1.000	-	1.000
PT Bank ANZ Indonesia (“Bank ANZ”)	Rp	-	1.000	-	-
HSBC	Rp	-	681	-	784
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat”)	Rp	-	400	-	-
Bank Danamon	Rp	-	13	-	16
Lain-lain	MYR	6	25	6	26
Sub-jumlah			24.481		18.541
Jumlah sebelum biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			45.502		41.258
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(99)		(109)
			45.403		41.149
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun			**(20.477)**		**(17.746)**
Bagian jangka panjang			**24.926**		**23.403**

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI								
2013	Sigma	Rp	650	17	2021-2027	Bulanan	1 bulan IndONIA + 3,12%	Piutang usaha dan aset tetap
2018	TLT	Rp	1.540	0	2018-2033	Kuartalan	3 bulan IndONIA + 1,54%	Aset tetap
2021-2025	Mitratel, PST, UMT, TIF, Telkomsel	Rp	21.650	4.779	2018-2032	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 0,75%; 3 bulan IndONIA + 0,25%-1,62%	Tidak ada
Bank Mandiri								
2018	Telkomsel	Rp	4.000	3.000	2018-2026	Kuartalan	5,00%	Tidak ada
2019-2024	GSD, PST, Mitratel	Rp	5.400	363	2021-2031	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 0,85%; 3 bulan IndONIA + 0,95%-2,85%	Tidak ada
BSI								
2021	Telkomsel	Rp	2.000	1.000	2025-2027	Bulanan	6,80%	Tidak ada
2024	Mitratel	Rp	2.500	208	2024-2029	Bulanan	1 bulan IndONIA + 0,85%	Tidak ada
BRI								
2023	Mitratel	Rp	1.000	29	2024-2030	Bulanan	1 bulan IndONIA + 1,00%	Tidak ada
BCA								
2020-2026	Perusahaan, PST, GSD, Mitratel, TIF	Rp	10.356	1.094	2022-2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 0,75%-0,90%; 3 bulan IndONIA + 1,25%-2,50%	Tidak ada
2021-2025	Perusahaan, Telkomsel, TIF	Rp	5.000	71	2022-2033	Bulanan, Kuartalan	6,80%-7,55%	Tidak ada
DBS								
2021-2025	Perusahaan, Mitratel, TIF	Rp	9.500	433	2022-2031	Bulanan, Kuartalan	1 bulan IndONIA + 0,95%; 3 bulan IndONIA + 1,30%	Tidak ada
2025	Telkomsel	Rp	1.000	1.000	2025-2026	Kuartalan	4,70%	Tidak ada
Bank of China								
2019	Telkomsel	Rp	1.900	3.800	2019-2026	Bulanan	6,00%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
2022	Mitratel	Rp	2.000	167	2024-2028	Bulanan	1 bulan IndONIA + 0,90%	Tidak ada
2025	Telkomsel	Rp	1.000	2.500	2025-2027	Bulanan	6,40%	Tidak ada
2021-2022	Telin	US$	0	0	2025-2030	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,82%	Tidak ada
Bank Permata								
2020-2024	Mitratel	Rp	2.250	771	2021-2031	Bulanan	1 bulan IndONIA + 1,02%	Tidak ada
2025	Telkomsel	Rp	1.000	1.000	2025-2027	Bulanan	5,60%	Tidak ada
Bank Sinarmas								
2024	Telkomsel	Rp	1.000	3.000	2025-2026	Kuartalan	6,42%	Tidak ada
Bank ANZ								
2025	Telkomsel	Rp	1.500	-	2025-2027	Bulanan	7,45%	Tidak ada
HSBC								
2021-2023	Mitratel	Rp	1.250	103	2023-2030	Bulanan	1 bulan IndONIA + 0,90%	Tidak ada
Bank Muamalat								
2026	Mitratel	Rp	400	-	2026-2033	Bulanan	3 bulan IndONIA + 0,75%	Tidak ada
Bank Danamon								
2024	SSI	Rp	24	2	2024-2029	Bulanan	8,75%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal
** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijaminkan.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Utang bank (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk Sigma terkait *debt to service coverage ratio* yang masih lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) untuk pinjaman sebesar Rp47 miliar dari BNI untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma. *Waiver* dari BNI diterima pada tanggal 15 Desember 2025 dan berlaku efektif selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha dan keperluan investasi.

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	7.749	10.381
Mitratel	7.835	8.404
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	1.166	1.067
Jumlah	**16.750**	**19.852**

	2026	2025
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	3.156	3.062
Mitratel	313	213
Lain-lain	149	57
Jumlah	**3.618**	**3.332**

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel dan Mitratel. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel dan Mitratel masing-masing adalah sebesar 30,10% dan 28,16%.

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dan Mitratel disajikan di bawah ini. Informasi ini berdasarkan nilai sebelum penyesuaian dan eliminasi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	Telkomsel		Mitratel	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset lancar	14.580	17.651	4.578	3.051
Aset tidak lancar	95.918	96.976	55.528	55.299
Liabilitas jangka pendek	(49.872)	(41.560)	(11.217)	(7.500)
Liabilitas jangka panjang	(41.091)	(44.791)	(16.837)	(17.499)
Jumlah ekuitas	**19.535**	**28.276**	**32.052**	**33.351**
Yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	11.786	17.895	24.217	24.947
Kepentingan nonpengendali	7.749	10.381	7.835	8.404

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material (lanjutan)

Ringkasan laporan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain:

	Telkomsel		Mitratel	
	2026	2025	2026	2025
Pendapatan	55.609	53.844	4.691	4.596
Beban operasi	(40.422)	(40.617)	(2.653)	(2.502)
Beban lain-lain - bersih	(1.818)	(966)	(863)	(917)
Laba sebelum pajak penghasilan	**13.369**	**12.261**	**1.175**	**1.177**
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.882)	(2.085)	(63)	(83)
Laba periode berjalan	**10.487**	**10.176**	**1.112**	**1.094**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	621	0	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	**11.108**	**10.176**	**1.112**	**1.094**
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	3.156	3.062	313	213
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	5.974	6.729	538	545

Ringkasan laporan arus kas:

	Telkomsel		Mitratel	
	2026	2025	2026	2025
Kegiatan operasi	23.569	18.603	4.627	4.734
Kegiatan investasi	(6.143)	(5.776)	(730)	(809)
Kegiatan pendanaan	(17.363)	(12.680)	(2.554)	(1.753)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**63**	**147**	**1.343**	**2.172**

21. MODAL SAHAM

	30 Juni 2026		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	516.023.535	0,52	26
DAM	51.086.330.024	51,57	2.554
The Bank of New York Mellon Corporation*	6.224.018.780	6,28	311
Direksi (Catatan 1b):			
Dian Siswarini	202.000	0	0
Veranita Yosephine	90.000	0	0
Nanang Hendarno	32.500	0	0
Faizal Rochmad Djoemadi	248.500	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Rizal Mallarangeng	3.240.600	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	40.750.754.860	41,14	2.038
Jumlah	98.580.940.800	99,51	4.929
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 1c)	481.275.800	0,49	24
Jumlah	**99.062.216.600**	**100,00**	**4.953**

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2025		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
DAM	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.356.822.980	4,40	218
Direksi (Catatan 1b):			
Dian Siswarini	203.000	0	0
Veranita Yosephine	90.000	0	0
Nanang Hendarno	32.500	0	0
Faizal Rochmad Djoemadi	248.500	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Rizal Mallarangeng	3.240.600	0	0
Silmy Karim	1.344.700	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.088.935.360	43,50	2.155
Jumlah	99.053.271.200	99,99	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 1c)	8.945.400	0,01	0
Jumlah	**99.062.216.600**	**100,00**	**4.953**

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Nomor 121 tanggal 22 Maret 2025, Pemerintah mengalihkan kepemilikan 51.602.353.559 Saham Seri B, atau 52,09% dari seluruh saham Perusahaan, kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI") melalui proses penyertaan saham *inbreng*.

Pengalihan saham ini merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu:
(a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham BKI untuk Pendirian *Holding* Operasional;
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("Danantara").

BKI, sebagai penerima pengalihan, merupakan Perusahaan Induk Operasional (*Holding* Operasional) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah melalui BP BUMN dan Danantara. Pemerintah tetap berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*Ultimate Beneficial Owner*) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan tidak langsung saham Seri B milik BKI melalui Danantara. Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 163 tanggal 23 Mei 2025, BKI berubah nama menjadi DAM.

Pada tanggal 6 Januari 2026, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B pada BUMN kepada BP BUMN Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DIDAM.DO/2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM, DAM mengalihkan 516.023.535 lembar saham Seri B milik Perusahaan kepada BP BUMN, yang mewakili 1% dari total kepemilikan Negara melalui BP BUMN dan DAM atau sebesar 0,52% dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh oleh Perusahaan. Setelah pengalihan tersebut, Pemerintah tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*ultimate beneficial owner*) melalui kepemilikan langsung BP BUMN sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan 516.023.535 lembar saham Seri B, serta melalui DAM sebanyak 51.086.330.024 lembar saham Seri B yang terkonsolidasi pada Danantara. Perubahan kepemilikan saham tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 6 Januari 2026.

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	8.364	8.364
Selisih kurs karena penjabaran	1.957	1.462
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	10	10
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	**10.754**	**10.259**

23. PENDAPATAN

Grup memperoleh pendapatan dari lini produk utama sebagai berikut:

2026	B2C	B2B Infra	B2B ICT	Internasional	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	38.133	-	-	-	-	38.133
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	253	657	5.345	908	-	7.163
Lain-lain	105	689	319	91	1.684	2.888
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	**38.491**	**1.346**	**5.664**	**999**	**1.684**	**48.184**
Pendapatan IndiHome	**12.798**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.798**
Pendapatan interkoneksi	**186**	**438**	**-**	**3.821**	**-**	**4.445**
Pendapatan telepon						
Selular	1.307	-	-	92	-	1.399
Telepon tidak bergerak	-	35	211	-	-	246
SMS	1.790	-	8	-	-	1.798
Jumlah pendapatan telepon	**3.097**	**35**	**219**	**92**	**-**	**3.443**
Pendapatan jaringan	**1**	**1.090**	**192**	**826**	**-**	**2.109**
Layanan lainnya						
E-payment	-	-	-	-	1.022	1.022
Call center service	-	-	589	-	-	589
Manage service dan terminal	-	-	389	2	-	391
Lain-lain	156	303	222	4	763	1.448
Jumlah layanan lainnya	**156**	**303**	**1.200**	**6**	**1.785**	**3.450**
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**54.729**	**3.212**	**7.275**	**5.744**	**3.469**	**74.429**
Pendapatan dari transaksi *lessor*	**-**	**1.449**	**-**	**-**	**-**	**1.449**
Jumlah pendapatan	**54.729**	**4.661**	**7.275**	**5.744**	**3.469**	**75.878**

2025	B2C	B2B Infra	B2B ICT	Internasional	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	33.961	-	-	-	-	33.961
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	208	538	5.413	906	-	7.065
Lain-lain	29	607	248	75	1.346	2.305
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	**34.198**	**1.145**	**5.661**	**981**	**1.346**	**43.331**
Pendapatan IndiHome	**13.251**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.251**
Pendapatan interkoneksi	**190**	**618**	**-**	**4.154**	**-**	**4.962**
Pendapatan telepon						
Selular	2.701	-	-	100	-	2.801
Telepon tidak bergerak	-	28	246	-	-	274
SMS	1.755	-	16	-	-	1.771
Jumlah pendapatan telepon	**4.456**	**28**	**262**	**100**	**-**	**4.846**
Pendapatan jaringan	**2**	**867**	**271**	**580**	**-**	**1.720**
Layanan lainnya						
E-payment	-	-	-	-	747	747
Call center service	-	-	628	-	-	628
Manage service dan terminal	-	-	368	2	-	370
E-health	-	-	-	-	362	362
Lain-lain	118	187	182	14	687	1.188
Jumlah layanan lainnya	**118**	**187**	**1.178**	**16**	**1.796**	**3.295**
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**52.215**	**2.845**	**7.372**	**5.831**	**3.142**	**71.405**
Pendapatan dari transaksi *lessor*	**-**	**1.473**	**-**	**-**	**-**	**1.473**
Jumlah pendapatan	**52.215**	**4.318**	**7.372**	**5.831**	**3.142**	**72.878**

23. PENDAPATAN (lanjutan)

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun masing-masing adalah sebesar Rp10.317 miliar dan Rp7.645 miliar, dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah masing-masing sebesar Rp5.979 miliar dan Rp3.344 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 25 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2027 hingga 2039. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Gaji dan tunjangan	4.666	5.024
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	1.961	1.955
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 30)	813	864
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 31)	61	161
Lain-lain	82	24
Jumlah	**7.583**	**8.028**

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Operasi dan pemeliharaan	12.911	11.516
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 35c.i)	3.902	3.844
Sewa sirkit dan *Customer Premise Equipment* (“CPE”)	1.748	1.663
Beban hak penyelenggaraan dan KPU (Catatan 15)	1.638	1.437
Listrik, gas, dan air	548	509
Beban pokok penjualan kartu SIM, voucer, dan periferal (Catatan 7)	275	262
Manajemen proyek	192	162
Asuransi	141	164
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	119	117
Jumlah	**21.474**	**19.674**

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha (Catatan 5)	1.190	970
Beban umum	1.172	1.234
Jasa profesional	296	314
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	191	155
Perjalanan	178	151
Rapat	150	159
Sumbangan sosial	137	143
Beban penagihan	113	45
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	242	171
Jumlah	**3.669**	**3.342**

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	87	4
Pasal 4(2) - Pajak final	45	16
Pasal 22 - Pembelian barang	3	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	234	55
PPN	1.835	1.587
Jumlah pajak dibayar di muka	2.204	1.662
Bagian jangka pendek	**(2.204)**	**(1.662)**
Bagian jangka panjang	**-**	**-**

b. Klaim restitusi pajak

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Perusahaan		
PPh		
PPh Badan	297	663
PPh 21 - PPh pribadi	41	42
PPN	219	746
Entitas anak		
PPh		
PPh Badan	1.390	1.806
PPh 21 - PPh pribadi	-	6
PPh 23 - Penyerahan jasa	32	60
PPN	919	990
Jumlah tagihan restitusi pajak	2.898	4.313
Bagian jangka pendek	**(227)**	**(317)**
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	**2.671**	**3.996**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4(2) - Pajak final	13	31
Pasal 21 - PPh pribadi	48	2
Pasal 22 - Pembelian barang	1	1
Pasal 23 - Penyerahan jasa	32	46
Pasal 29 - PPh Badan	250	-
PPN	621	304
PPN atas Pemungutan Pajak (“WAPU”)	181	185
	1.146	569
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4(2) - Pajak final	142	219
Pasal 21 - PPh pribadi	194	52
Pasal 22 - Pembelian barang	4	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	43	183
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	506	52
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	291	14
Pasal 29 - PPh Badan	1.037	317
PPN	297	147
PPN WAPU	645	467
	3.159	1.456
Jumlah utang pajak	**4.305**	**2.025**

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Kini		
Perusahaan	682	612
Entitas anak	4.049	3.510
	4.731	4.122
Tangguhan		
Perusahaan	120	173
Entitas anak	(385)	(1.003)
	(265)	(830)
Beban pajak penghasilan bersih	**4.466**	**3.292**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	18.040	17.407
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	15.309	11.170
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	33.349	28.577
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(20.407)	(16.750)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	12.942	11.827
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(658)	(531)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	12.284	11.296
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	320	(98)
Pendapatan instalasi tangguhan	-	32
Sewa	(3)	(20)
Provisi imbalan karyawan	556	24
Hak atas tanah, aset takberwujud dan lainnya	(22)	22
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(1.113)	(76)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(229)	(803)
Beban yang masih harus dibayar	58	-
Lain-lain	2	67
Jumlah perbedaan temporer bersih	(431)	(852)
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	196	184
Sumbangan	76	89
Imbalan karyawan	11	5
Beban untuk mendapatkan obyek pajak penghasilan final	291	116
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(9.352)	(8.129)
Beban lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	167	-
Lain-lain	28	82
Jumlah perbedaan tetap bersih	(8.583)	(7.653)
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	**3.270**	**2.791**
Beban pajak penghasilan kini	621	530
Beban pajak penghasilan final	61	82
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	682	612
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	4.049	3.510
Jumlah beban pajak penghasilan kini	**4.731**	**4.122**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	18.040	17.407
Dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih konsolidasian	(4.312)	(4.555)
	13.728	12.852
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	2.608	2.442
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	378	311
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	742	777
Beban pajak penghasilan final	59	82
Dampak dari pengalihan bisnis entitas sepengendali	180	-
Pajak tangguhan yang tidak diakui	2	13
Lain-lain	497	(333)
Beban pajak penghasilan bersih	**4.466**	**3.292**

Dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan dalam Pasal 17 ayat (2b) mengatur bahwa bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif seharusnya.

Perusahaan telah menerapkan tarif pajak PPh Badan sebesar 19% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perhitungan pajak Perusahaan untuk tahun 2025 di atas telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2025 pada tanggal 29 Juni 2026.

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Pada bulan Juni 2025, Perusahaan menerima sejumlah ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2023. Pada bulan Agustus 2025, dari seluruh ketetapan pajak tersebut Perusahaan menerima restitusi bersih sebesar Rp589,1 miliar setelah dipotong dengan tagihan dan ketetapan pajak. Pada bulan Agustus 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") hasil pemeriksaan PPN tahun 2022 senilai total Rp10,1 miliar (termasuk denda).

Pada bulan Agustus 2025, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak tahun 2024.

Pada bulan Oktober 2025, Perusahaan menerima surat keputusan keberatan pajak yang menolak permohonan keberatan yang telah diajukan Perusahaan terhadap surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tahun 2019 dan 2020 senilai Rp35,7 miliar. Perusahaan sedang dalam proses upaya hukum banding atas sengketa pajak tahun 2019 dan 2020. Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, proses pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2024, dan proses banding atas sengketa pajak tahun pajak 2019 dan 2020 masih berlangsung.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan April 2026, Perusahaan menerima sejumlah ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2024. Pada bulan Mei 2026, Perusahaan menerima total restitusi bersih sebesar Rp756,9 miliar setelah dipotong dengan tagihan dan ketetapan pajak. Restitusi pajak pada tahun 2026 ini tidak dikembalikan ke rekening Perusahaan namun ditempatkan pada saldo deposit *coretax* dan digunakan untuk pembayaran pajak pada periode berikutnya.

Pada tanggal 15 Oktober 2026, berkaitan dengan upaya hukum Gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar No. KEP-00009/NBCT/WPJ.19/2026 mengenai Penolakan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dari Perusahaan kepada TIF, Perusahaan menyampaikan Surat Bantahan atas Tanggapan DJP. Saat ini, Perusahaan sedang menunggu panggilan sidang pertama atas upaya hukum tersebut.

(ii) Telkomsel

Pada tanggal 30 Juni 2026, Telkomsel memiliki sejumlah ketetapan pajak yang sedang dalam proses banding. Rincian klaim restitusi pajak, baik yang berkaitan dengan ketetapan pajak maupun yang belum ditetapkan oleh Otoritas Pajak, termasuk eksposur ketetapan pajak yang tidak disertai dengan klaim pajak oleh Telkomsel, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026				
	Keberatan	Banding	Peninjauan kembali	Lainnya	Jumlah
Klaim restitusi pajak yang belum ditetapkan oleh Otoritas Pajak					
Telkomsel					
PPh Badan					
Tahun pajak 2025	-	-	-	261	261
Anak perusahaan					
PPN					
Tahun Pajak 2025	-	-	-	41	41
PPh					
Tahun Pajak 2025	-	-	-	1	1
Ketetapan pajak dengan klaim restitusi pajak					
PPh Badan					
Tahun pajak 2024	-	-	-	791	791
Tahun pajak 2014	-	-	55	-	55
PPh					
Tahun pajak 2015	-	-	-	0	0
	-	**-**	**55**	**1.094**	**1.149**
Ketetapan pajak tanpa adanya klaim restitusi pajak					
PPh Badan					
Tahun pajak 2023	1.623	-	-	-	1.623
PPh					
Tahun pajak 2024	388	-	-	-	388
Tahun pajak 2023	12.844	-	-	-	12.844
	14.855	**-**	**-**	**-**	**14.855**

Pada tanggal 6 Oktober 2025, Telkomsel telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPh Pasal 23 dan PPh Badan untuk tahun fiskal 2023 masing-masing sebesar Rp12.844 miliar (termasuk sanksi sebesar Rp3.823 miliar) dan Rp1.623 miliar (termasuk sanksi sebesar Rp445 miliar).

Kurang bayar PPh Pasal 23 untuk tahun fiskal 2023 terkait dengan pengalihan bisnis konsumen IndiHome dari Perusahaan beserta transaksi pendukung yang menyertainya. Telkomsel berpendapat bahwa klaim Otoritas Pajak yang mengukur kembali selisih nilai buku dengan nilai transaksi pengalihan bisnis sebagai objek penetapan kurang bayar PPh Pasal 23 tidak memiliki dasar yang memadai.

Untuk kurang bayar PPh Badan tahun fiskal 2023 terkait dengan nilai transaksi kerja sama aktivitas operasional segmen bisnis IndiHome antara Telkomsel dengan Perusahaan telah menggunakan nilai yang wajar, Telkomsel memiliki argumen teknis yang kuat untuk mendukung posisi perpajakannya serta meyakini telah mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Telkomsel telah mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak pada tanggal 10 Desember 2025 dan telah menerima Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 15 September 2026 yang menolak seluruhnya keberatan Telkomsel. Atas keputusan keberatan ini, Telkomsel tetap meyakini bahwa Telkomsel memiliki argumen yang kuat untuk mendukung posisi perpajakannya dan meyakini telah mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta berencana untuk melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak paling lambat 14 Desember 2026.

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan		(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	2026	2025
Perusahaan				
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	779	718	61	(19)
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala - bersih	804	1.001	(212)	(14)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	3.590	2.519	(83)	(164)
Provisi imbalan karyawan	405	298	107	5
Pendapatan instalasi tangguhan	19	19	-	6
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	42	47	(4)	4
Beban yang masih harus dibayar	63	-	12	13
Aset hak guna	(8)	(16)	8	16
Liabilitas sewa	8	17	(9)	(20)
Lain-lain	14	78	-	-
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	5.716	4.681	(120)	(173)
Telkomsel				
Provisi imbalan karyawan	1.475	1.698	(48)	103
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	755	571	184	121
Liabilitas sewa	8.314	7.849	465	(544)
Liabilitas kontrak	351	399	(48)	34
Aset hak guna	(7.464)	(7.233)	(231)	1.323
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.443)	(1.458)	15	(38)
Amortisasi lisensi	(171)	(195)	24	(16)
Biaya kontrak	(1)	(6)	5	10
Instrumen-instrumen keuangan lainnya	(310)	(270)	(32)	(32)
Pengukuran nilai wajar atas instrumen-instrumen keuangan	-	(8)	-	-
Aset pajak tangguhan Telkomsel - bersih	1.506	1.347	334	961
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	561	575	(14)	(1)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(2.340)	(1.233)	65	43
Beban pajak tangguhan (manfaat)			**265**	**830**
Aset pajak tangguhan - bersih	**7.783**	**6.603**		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(2.340)**	**(1.233)**		

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui adalah masing-masing sebesar Rp58.151 miliar dan Rp28.516 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465 tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan No. 81 Tahun 2024. Guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat, pada akhir Desember 2024 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024) yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2025. PMK 131/2024 mengatur bahwa atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang PPN yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.

Penerbitan PMK 131/2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur bahwa selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2025 akan diterapkan tarif PPN sebesar 12%. Pada bulan Februari 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan memastikan koordinasi dengan unit terkait, Tim IT dan otoritas perpajakan agar proses administrasi perpajakan yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan serta ketentuan penggunaan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN berjalan lancar.

Dalam rangka menerapkan Pilar Kedua Kerangka Kerja Inklusif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Kedua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Grup telah melakukan analisis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi adanya potensi pajak tambahan pada entitas konstituen yang beroperasi di yurisdiksi Timor Leste. Grup berpendapat berdasarkan hasil analisis bahwa dampak potensi pajak tambahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Grup telah mengadopsi amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional-Ketentuan Model Pilar Dua, sebagaimana diterbitkan oleh DSAK IAI pada Desember 2023. Grup telah menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 222 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. BUMN diwajibkan menyampaikan realisasi kontribusi kepada negara (berbasis kas). Rincian kontribusi kepada negara pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026
Pajak	
PPh	7.774
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	6.554
Bea Masuk/Keluar, Bea dan Cukai, Bea Materai	1
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“PDRD”), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan)	59
Total kontribusi pajak	14.388
Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”)	
Dividen	-
PNBP Lainnya	3.599
Total kontribusi PNBP	3.599
Total kontribusi kepada negara	**17.987**

28. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp9.956 miliar dan Rp10.783 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 98.815.834.912 dan 99.062.135.937 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian kembali saham selama periode berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp100,75 dan Rp108,85 (dalam jumlah penuh) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025. Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025.

29. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 10 tertanggal 8 Juni 2026 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.999 miliar (Rp223,17 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada tanggal 10 Juli 2026.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 52 tertanggal 27 Mei 2025 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2024 sebesar Rp21.047 miliar (Rp212,47 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada tanggal 19 Juni 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba ditentukan penggunaannya Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Program manfaat pensiun			
Perusahaan - *funded*	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	3.649	3.725
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	40	42
Perusahaan - *unfunded*	30a.i.b	165	216
Telkomsel	30a.ii	5.082	5.978
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		8.936	9.961
Imbalan kesehatan pasca kerja	30b	2.219	1.708
Imbalan pasca kerja lainnya	30c	152	187
Imbalan tunjangan masa kerja	30d	1	1
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	30e	1.159	1.139
Jumlah		**12.467**	**12.996**

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Catatan	2026	2025
Beban pensiun			
Perusahaan - *funded*	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	169	215
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	2	1
Perusahaan - *unfunded*	30a.i.b	(35)	12
Telkomsel	30a.ii	372	342
Beban pensiun berkala-bersih	24	508	570
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala-bersih	24,30b	196	188
Beban imbalan pasca kerja lainnya	24,30c	6	9
Beban imbalan tunjangan masa kerja	24,30d	0	0
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	24,30e	103	97
Jumlah		**813**	**864**

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pasti dan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program pensiun dan aset program kesehatan pasca kerja, status pendanaan program pensiun dan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

	Funded				Imbalan kesehatan pasca kerja		
	Manfaat pasti						
	Perusahaan		Telkomsel		Perusahaan		
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	Aset program kesehatan pasca kerja	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2026	**23.129**	**(19.404)**	**6.687**	**(709)**	**14.950**	**(13.242)**	**11.411**
Beban jasa	91	-	182	-	-	-	273
Beban bunga (pendapatan bunga)	721	(611)	209	(20)	494	(436)	357
Beban administrasi program	(52)	52	-	1	-	138	139
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	16	-	-	-	-	-	16
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	**776**	**(559)**	**391**	**(19)**	**494**	**(298)**	**785**
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	-	-	(227)	-	-	-	(227)
Perubahan asumsi keuangan	(1.830)	-	(549)	-	(930)	-	(3.309)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	1.916	-	25	-	1.245	3.186
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	**(1.830)**	**1.916**	**(776)**	**25**	**(930)**	**1.245**	**(350)**
Kontribusi pemberi kerja	-	(363)	-	(518)	-	-	(881)
Kontribusi peserta program pensiun	4	(4)	0	0	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(944)	944	(131)	131	(313)	313	-
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(16)	-	-	-	-	-	(16)
Penyesuaian akibat IFRIC	-	-	1	-	-	-	1
Saldo akhir, 30 Juni 2026	**21.119**	**(17.470)**	**6.172**	**(1.090)**	**14.201**	**(11.982)**	**10.950**
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	**3.649**		**5.082**		**2.219**		**10.950**

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pasti dan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program pensiun dan aset program kesehatan pasca kerja, status pendanaan program pensiun dan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut (lanjutan):

	Funded Manfaat pasti				Imbalan kesehatan pasca kerja		
	Perusahaan		Telkomsel		Perusahaan		
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	Aset program kesehatan pasca kerja	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2025	**22.377**	**(18.834)**	**6.089**	**(1.139)**	**14.152**	**(12.602)**	**10.043**
Beban jasa	177	-	332	-	-	-	509
Beban jasa lalu	-	-	294	-	-	-	294
Beban bunga (pendapatan bunga)	1.500	(1.271)	406	(55)	970	(862)	688
Beban administrasi program	(110)	110	-	1	-	173	174
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	**1.567**	**(1.161)**	**1.032**	**(54)**	**970**	**(689)**	**1.665**
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	(17)	-	(187)	-	(66)	-	(270)
Perubahan asumsi demografi	(1)	-	-	-	0	-	(1)
Perubahan asumsi keuangan	1.053	-	261	-	478	-	1.792
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(654)	-	3	-	(535)	(1.186)
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	**1.035**	**(654)**	**74**	**3**	**412**	**(535)**	**335**
Kontribusi pemberi kerja	-	(605)	-	(27)	-	-	(632)
Kontribusi peserta program pensiun	10	(10)	1	(1)	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(1.843)	1.843	-	-	(584)	584	-
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(17)	17	(288)	288	-	-	-
Pembayaran imbalan lalu oleh Perusahaan	-	-	(221)	221	-	-	-
Saldo akhir, 31 Desember 2025	**23.129**	**(19.404)**	**6.687**	**(709)**	**14.950**	**(13.242)**	**11.411**
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	**3.725**		**5.978**		**1.708**		**11.411**

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat *unfunded*, liabilitas manfaat tambahan, imbalan pasca kerja lainnya, dan kewajiban pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, perubahan aset program imbalan pensiun tambahan, dan nilai bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak	
	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan tunjangan masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2026	**42**	**216**	**187**	**1**	**1.139**	**1.585**
Beban jasa	0	4	2	0	84	90
Beban jasa lalu	-	(45)	(1)	-	-	(46)
Beban bunga	2	6	5	-	19	32
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	**2**	**(35)**	**6**	**0**	**103**	**76**
(Laba) rugi aktuaria diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(4)	-	-	-	(48)	(52)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	-	(16)	(41)	-	(29)	(86)
Penyesuaian akibat IFRIC	-	-	-	-	(1)	(1)
Divestasi entitas anak	-	-	-	-	(5)	(5)
Saldo akhir, 30 Juni 2026	**40**	**165**	**152**	**1**	**1.159**	**1.517**

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat *unfunded*, liabilitas manfaat tambahan, imbalan pasca kerja lainnya, dan kewajiban pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, perubahan aset program imbalan pensiun tambahan, dan nilai bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut (lanjutan):

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak	
	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan tunjangan masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2025	**42**	**215**	**175**	**1**	**1.064**	**1.497**
Beban jasa	0	10	5	1	134	150
Beban jasa lalu	-	-	-	-	(10)	(10)
Beban bunga	3	15	12	-	68	98
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	**3**	**25**	**17**	**1**	**192**	**238**
(Laba) rugi aktuaria diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	1	(14)	6	-	(5)	(12)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(4)	(10)	(11)	(1)	(68)	(94)
Divestasi entitas anak	-	-	-	-	(44)	(44)
Saldo akhir, 31 Desember 2025	**42**	**216**	**187**	**1**	**1.139**	**1.585**

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, sebagai berikut:

	Perusahaan						Telkomsel	Perusahaan dan anak perusahaan	
2026	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan tunjangan masa kerja	Manfaat pasti	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Beban jasa	91	0	4	-	2	0	182	84	363
Beban jasa lalu	-	-	(45)	-	(1)	-	-	-	(46)
Beban bunga	110	2	6	58	5	-	189	19	389
Beban administrasi program	-	-	-	138	-	-	1	-	139
Beban pensiun berkala bersih	201	2	(35)	196	6	0	372	103	845
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	16	-	-	-	-	-	-	-	16
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(48)	-	-	-	-	-	-	-	(48)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	**169**	**2**	**(35)**	**196**	**6**	**0**	**372**	**103**	**813**

	Perusahaan						Telkomsel	Perusahaan dan anak perusahaan	
2025	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan tunjangan masa kerja	Manfaat pasti	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Beban jasa	93	0	5	-	3	0	164	82	347
Beban bunga	114	1	7	54	6	-	178	15	375
Beban administrasi program	-	-	-	130	-	-	0	-	130
Beban pensiun berkala bersih	207	1	12	184	9	0	342	97	852
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(9)	-	-	4	-	-	-	-	(5)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	**215**	**1**	**12**	**188**	**9**	**0**	**342**	**97**	**864**

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Program manfaat pensiun

i. Perusahaan

(a) *Funded*

(i) Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp363 miliar dan Rp605 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Program manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 aset program manfaat pasti terdiri dari:

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	895	-	1.255	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	780	-	1.004	-
Barang konsumen primer	283	-	325	-
Bahan baku	254	-	383	-
Infrastruktur	278	-	431	-
Energi	138	-	175	-
Teknologi	72	-	91	-
Perindustrian	196	-	268	-
Barang konsumen non-primer	61	-	60	-
Properti dan *real estate*	50	-	75	-
Kesehatan	96	-	141	-
Transportasi dan logistik	4	-	7	-
Reksadana berbasis saham	46	-	74	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	1.906	-	2.031
Obligasi pemerintah	10.684	-	11.191	-
Reksadana pendapatan tetap (“RDPT”)	-	-	-	-
Reksadana indeks	10	-	14	-
Medium-term notes (“MTN”)	-	102	-	105
Efek beragun aset (“EBA”)	-	5	-	5
Sukuk	-	923	-	980
Saham non-publik:				
Penempatan langsung	-	359	-	359
Properti	-	204	-	204
Lainnya	-	384	-	495
Jumlah	**13.847**	**3.883**	**15.494**	**4.179**

Aset program pensiun termasuk di dalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp159 miliar dan Rp256 miliar, yang mewakili 0,91% dan 1,32% dari total aset program pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp231 miliar dan Rp248 miliar mewakili masing-masing 1,32% dan 1,28% dari total aset per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(1.309) miliar dan Rp1.924 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen. Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (“RKD”) Dapen di atas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2025, RKD Dapen di bawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti.

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Program manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menetapkan bagi para pensiunan yang berhenti selain karena Hukuman Disiplin, Pensiun Dini, dan Atas Permintaan Sendiri dan menerima Manfaat Pensiun kurang dari Rp1 juta per bulan diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan menjadi Rp1 juta. Pada tahun 2025 dan 2024, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 masing-masing sebesar Rp16 miliar dan Rp17 miliar.

Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, pada laporan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2026 dan 15 April 2026 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	7,25%	6,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

(ii) Manfaat Tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menyelenggarakan Program Manfaat Lain Iuran Pasti ("PMLIP") dalam bentuk Manfaat Tambahan. Peserta PMLIP berhak menerima Manfaat Pensiun Berkala tiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dana Manfaat Tambahan bersumber dari iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja dan dana penyisihan hasil pengembangan investasi apabila tercapai RKD di atas 102% dan tingkat pengembalian investasi ("ROI") di atas suku bunga aktuaria untuk pendanaan. Iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja untuk setiap peserta PMLIP ditetapkan sebesar Rp120 ribu untuk periode iuran 12 bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah penerimaan.

Penilaian aktuaria untuk program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pada laporan masing-masing tertanggal 15 April 2026 dan 19 Maret 2025 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat diskonto	6,50%	7,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Program manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(ii) Manfaat Tambahan (lanjutan)

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

(b) *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya. Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan di mana untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp29 miliar dan Rp48 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, di mana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, di antaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pada laporan masing-masing tertanggal 15 April 2026 dan 19 Maret 2025 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat diskonto	6,25%	7,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,00%-8,00%	6,00%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Program manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tanggal 23 April 2021, Telkomsel dan Jiwasraya sepakat untuk mengakhiri kontrak program asuransi tersebut dan menandatangani perjanjian restrukturisasi. Perjanjian tersebut menggantikan program manfaat dari anuitas menjadi manfaat sekaligus (*lump sum*). Berdasarkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan nilai tunai pada tanggal pengakhiran yang terbagi menjadi nilai tunai untuk peserta aktif dan peserta pasif masing-masing sebesar Rp857 miliar dan Rp73 miliar. Terdapat potongan 5% dari nilai tunai untuk peserta aktif, maka 95% dari Rp857 miliar (atau setara dengan Rp814 miliar) ditambah Rp73 miliar akan menjadi jumlah yang selanjutnya diambil alih oleh PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") pada saat perjanjian dengan IFG Life menjadi efektif dan karenanya, perjanjian restrukturisasi akan berakhir. Pada tanggal 30 November 2023, dana tunai telah selesai diambil alih oleh IFG Life dengan tidak terdapat perubahan pada program dan nilai tunai yang dialihkan pada tanggal pengalihan, dan di saat yang sama, perjanjian restrukturisasi dinyatakan berakhir.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan dan Telkomsel menandatangani perjanjian mengenai Dapen untuk menunjuk Telkomsel sebagai Mitra dari Perusahaan sebagai satu-satunya Pendiri, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi Telkomsel sebagaimana diatur pada Peraturan Dana Pensiun efektif sejak tanggal pemisahan segmen usaha IndiHome ke Telkomsel.

Sejak tanggal pemisahan segmen usaha IndiHome ke Telkomsel, Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang dialihkan, yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dapen. Dapen dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai Pendiri dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Pendiri.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi sebesar 18% dari gaji pokok ke dana pensiun. Kontribusi Telkomsel kepada Dapen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp518 miliar (2025: Rp27 miliar).

Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dengan laporan tertanggal masing-masing 26 Agustus 2026 dan 13 Februari 2026 yang dilakukan oleh KKA Halim dan Rekan, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Milliman. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	7,20%	6,30%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,75%-8,00%	7,00%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, aset program terdiri dari:

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	415	-	700	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	785	-	983	-
Barang konsumen primer	256	-	300	-
Bahan baku	227	-	276	-
Infrastruktur	365	-	500	-
Energi	158	-	238	-
Teknologi	44	-	62	-
Perindustrian	171	-	296	-
Barang konsumen non-primer	90	-	95	-
Properti dan *real estate*	51	-	79	-
Kesehatan	68	-	99	-
Transportasi dan logistik	1	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	247	-	326	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi pemerintah	2.348	-	2.321	-
Obligasi korporasi	560	-	447	-
Reksadana pendapatan tetap	5.656	-	5.972	-
Exchange Traded Fund ("ETF")	43	-	35	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	522	-	535
Jumlah	**11.485**	**522**	**12.732**	**535**

Aset program Yakes Telkom juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp172 miliar dan Rp251 miliar yang merupakan 1,43% dan 1,89% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025. Obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar senilai Rp92 miliar dan Rp99 miliar mewakili masing-masing 0,77% dan 0,74% dari total aset per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025. Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(857) miliar dan Rp1.397 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, pada laporan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2026 dan 15 April 2026 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	7,25%	6,75%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

Penilaian aktuaria untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pada laporan masing-masing tertanggal 15 April 2026 dan 19 Maret 2025 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat diskonto	6,00%	7,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat liabilitas imbalan khusus masa kerja pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp1 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp0 miliar dan Rp0 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025.

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat liabilitas tambahan ini pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp1.159 miliar dan Rp1.139 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp103 miliar dan Rp97 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025.

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Perkiraan pembayaran manfaat						
	Perusahaan						
	Funded						
Jangka waktu	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan
30 Juni 2026							
Dalam 10 tahun kedepan	19.278	34	236	6.752	8.914	159	1.863
Dalam 10-20 tahun	14.041	27	95	8.962	13.821	119	5.037
Dalam 20-30 tahun	7.645	13	195	4.486	13.319	60	3.171
Dalam 30-40 tahun	2.430	4	6	67	6.810	1	163
Dalam 40-50 tahun	373	1	-	-	1.643	-	-
Dalam 50-60 tahun	22	-	-	-	250	-	-
Dalam 60-70 tahun	-	-	-	-	40	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	2	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	7,74 tahun	8,11 tahun	6,28 tahun	9,13 tahun	14,98 tahun	5,04 tahun	11,43 tahun

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti (lanjutan)

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Perkiraan pembayaran manfaat						
	Perusahaan						
	Funded						
Jangka waktu	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	*Unfunded*	Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan
31 Desember 2025							
Dalam 10 tahun kedepan	20.124	38	253	6.688	8.654	200	1.848
Dalam 10-20 tahun	14.464	27	95	9.486	13.671	119	5.030
Dalam 20-30 tahun	8.069	13	195	5.080	13.558	60	3.243
Dalam 30-40 tahun	2.667	4	6	77	7.185	1	238
Dalam 40-50 tahun	430	1	-	-	1.800	-	-
Dalam 50-60 tahun	26	-	-	-	281	-	-
Dalam 60-70 tahun	-	-	-	-	52	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	5	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	8,11 tahun	8,11 tahun	6,28 tahun	10 tahun	16,34 tahun	5,04 tahun	11,35 tahun

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Sensitivitas				
30 Juni 2026				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.594)	1.848	71	(68)
Tidak didanai	(8)	9	9	(9)
Telkomsel	(424)	477	519	(469)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.574)	1.905	1.897	(1.597)
Imbalan pasca kerja lainnya	(8)	8	3	(3)
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	(90)	97	134	(123)
31 Desember 2025				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.885)	2.205	139	(134)
Tidak didanai	(10)	11	12	(11)
Telkomsel	(492)	558	595	(534)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.738)	2.118	2.020	(1.693)
Imbalan pasca kerja lainnya	(9)	10	3	(3)
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	(93)	100	135	(124)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir tahun pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal eksternal lain yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

31. PENGHARGAAN MASA KERJA ("*LONG SERVICE AWARDS*" atau "LSA")

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* ("LSL"). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebesar Rp1.209 miliar dan Rp1.308 miliar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp61 miliar dan Rp161 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Catatan 24).

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun atau transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun atau Transaksi
Pemerintah		
Menteri Keuangan	Entitas induk terakhir	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN		
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara	Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban konsultan, beban kesehatan karyawan, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Bahana TCW	Entitas sepengendali	Reksa dana
Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sepengendali	Pinjaman lainnya dan biaya pendanaan
BUMN lainnya	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya")	Entitas asosiasi	Beban pemasaran dan distribusi kartu SIM dan voucer prabayar
PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Padi UMKM	Entitas berelasi lainnya	Beban jasa operasional dan pemeliharaan, beban pencairan piutang, beban pelatihan, beban pengamanan internal, beban pengembangan dan penelitian, beban cetak dan printing, beban rapat, beban umum dan administrasi lainnya, beban promosi, beban iklan, beban penjualan, beban *customer education*, dan beban pemasaran
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun atau transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Grup mencatat peningkatan (penurunan) atas kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp(60) miliar dan Rp(29) miliar.

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait:

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Pendapatan				
Entitas induk terakhir				
Menteri Keuangan	139	0,18	105	0,14
Entitas sepengendali				
Indosat	1.331	1,75	1.198	1,64
Pertamina	332	0,44	328	0,45
BNI	276	0,36	329	0,45
BRI	146	0,19	161	0,22
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	424	0,56	432	0,59
Sub-jumlah	2.509	3,30	2.448	3,35
Entitas berelasi lainnya	140	0,18	87	0,12
Entitas asosiasi	3	0,00	3	0,00
Jumlah	**2.791**	**3,66**	**2.643**	**3,61**

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Beban				
Entitas sepengendali				
PLN	1.478	2,66	1.440	2,68
Indosat	264	0,48	308	0,57
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	94	0,17	150	0,28
Sub-jumlah	1.836	3,31	1.898	3,53
Entitas berelasi lainnya				
Padi UMKM	258	0,47	173	0,32
Lain-lain	34	0,06	30	0,06
Sub-jumlah	292	0,53	203	0,38
Entitas asosiasi	53	0,10	37	0,07
Jumlah	**2.181**	**3,94**	**2.138**	**3,98**

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait (lanjutan):

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	169	22,68	204	23,00
Jumlah	**169**	**22,68**	**204**	**23,00**

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	514	24,72	637	24,06
Jumlah	**514**	**24,72**	**637**	**24,06**

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sepengendali	-	-	23	0,24
Jumlah	**-**	**-**	**23**	**0,24**

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucer				
Entitas asosiasi	42	0,06	32	0,04
Jumlah	**42**	**0,06**	**32**	**0,04**

c. Saldo dengan pihak berelasi

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait:

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	**44.529**	**14,75**	**27.231**	**9,46**
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	**1.119**	**0,37**	**642**	**0,22**
Piutang usaha (Catatan 5)	**2.011**	**0,67**	**2.040**	**0,71**
Aset kontrak				
Entitas induk terakhir				
Menteri Keuangan	43	0,01	94	0,03
Entitas sepengendali	200	0,07	210	0,07
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	4	0,00	4	0,00
Jumlah	**248**	**0,08**	**309**	**0,10**
Aset lancar lainnya	**163**	**0,05**	**151**	**0,05**
Aset tidak lancar lainnya	**4**	**0,00**	**7**	**0,00**

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait (lanjutan):

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 15)				
Entitas induk terakhir				
Menteri Keuangan	-	-	7	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	206	0,12	281	0,20
Indosat	159	0,09	200	0,15
Sub-jumlah	365	0,21	481	0,35
Entitas asosiasi	11	0,01	3	0,00
Entitas berelasi lainnya	106	0,06	80	0,06
Jumlah	**482**	**0,28**	**571**	**0,42**
Beban yang masih harus dibayar				
Entitas sepengendali				
BUMN	285	0,17	279	0,20
Bank milik negara	61	0,04	58	0,04
Lain-lain	2	0,00	1	0,00
Sub-jumlah	348	0,21	338	0,24
Entitas asosiasi	7	0,00	7	0,01
Entitas berelasi lainnya	1	0,00	-	-
Jumlah	**356**	**0,21**	**345**	**0,25**
Liabilitas kontrak				
Entitas induk terakhir				
Menteri Keuangan	55	0,03	58	0,04
Entitas sepengendali				
BUMN	648	0,39	698	0,51
Lain-lain	1	0,00	1	0,00
Sub-jumlah	649	0,39	699	0,51
Entitas asosiasi	8	0,00	5	0,00
Entitas berelasi lainnya				
KCIC	934	0,56	1.023	0,75
Lain-lain	11	0,01	8	0,01
Sub-jumlah	945	0,57	1.031	0,76
Jumlah	**1.657**	**0,99**	**1.793**	**1,31**
Deposit dari pelanggan	**19**	**0,01**	**19**	**0,01**
Utang bank jangka pendek (Catatan 18)	**4.707**	**2,81**	**1.490**	**1,09**
Utang bank jangka panjang (Catatan 19b)	**21.021**	**12,56**	**22.717**	**16,55**

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular ("*Global System for Mobile Communications*" atau "GSM") milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa Sambungan Langsung Internasional ("SLI") Perusahaan dengan menekan "007".

Pemilik Indosat, Ooredoo telah melakukan merger dengan Tri, CK Hutchison Holdings ("CKHH") dengan menggabungkan perusahaan mereka menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Dengan adanya merger ini dan Peraturan Menkominfo terbaru No. 5 tahun 2021, Perusahaan telah melakukan amandemen perjanjian kerjasama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"), dan internasional) dan jaringan bergerak pada tanggal 30 Mei 2023 dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi tahun 2014.

Perusahaan juga menyediakan sewa sirkit kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk gaji atau honorarium dan fasilitas untuk mendukung tata kelola dan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta tugas kepemimpinan dan manajemen Direksi. Jumlah remunerasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2026		2025	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	312	0,56%	278	0,52%
Dewan Komisaris	26	0,05%	102	0,19%

Jumlah yang disajikan pada tabel di atas adalah jumlah yang diakui sebagai beban umum dan administrasi selama periode laporan keuangan.

33. SEGMEN OPERASI

Pada tahun 2025, Manajemen mengubah dasar pengelompokan segmen operasi Grup dari pendekatan berbasis *Customer Facing Unit* ("CFU") menjadi pendekatan berbasis *business pillar*. Perubahan ini dilakukan untuk mencerminkan cara PKO dalam menelaah kinerja segmen operasi dan mengalokasikan sumber daya. Sehubungan dengan perubahan tersebut, informasi segmen untuk tahun sebelumnya telah disajikan kembali agar konsisten dengan penyajian informasi segmen pada tahun berjalan.

Grup mengidentifikasi lima segmen yang dilaporkan, yaitu B2C, B2B Infra, B2B ICT, Internasional, dan Lain-lain. Tidak terdapat penggabungan segmen operasi dalam penentuan segmen dilaporkan tersebut. Segmen B2C mencakup penyediaan layanan telekomunikasi kepada pelanggan individu/perumahan, termasuk layanan *mobile* dan *fixed broadband*. Segmen B2B Infra mencakup penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk menara telekomunikasi, jaringan *fiber optic*, *backbone*, d*ata center*, dan satelit. Segmen B2B ICT mencakup penyediaan layanan *system integration*, jasa teknologi informasi, dan solusi digital kepada pelanggan korporasi dan institusional. Segmen Internasional mencakup penyediaan layanan konektivitas internasional dan jasa *wholesale* kepada operator telekomunikasi dan pelanggan di luar negeri. Segmen Lain-lain mencakup kegiatan usaha pendukung antara lain layanan media dan konten, jasa konsultasi dan pengelolaan bisnis, perdagangan dan distribusi, layanan teknologi informasi tertentu, serta aktivitas investasi dan pengembangan bisnis lainnya.

PKO menelaah kinerja masing-masing segmen dilaporkan berdasarkan laba atau rugi segmen yang diukur secara konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antarsegmen operasi. Transaksi tersebut dieliminasi pada saat konsolidasi dan ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku (*arm's length basis*).

	2026							
	B2C	B2B Infra	B2B ICT	Internasional	Lain-lain	Total segmen	Penyesuaian dan eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	54.729	4.661	7.275	5.744	3.469	75.878	-	75.878
Pendapatan antar segmen	880	28.395	1.486	580	11.976	43.317	(43.317)	-
Jumlah pendapatan segmen	55.609	33.056	8.761	6.324	15.445	119.195	(43.317)	75.878
Hasil segmen	15.201	8.061	669	416	(995)	23.352	(5.312)	18.040
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(5.444)	(2.817)	(299)	(193)	(25)	(8.778)	(670)	(9.448)
Penyusutan dan amortisasi	(11.044)	(6.960)	(802)	(407)	(336)	(19.549)	2.346	(17.203)
Provisi diakui selama periode berjalan	(901)	(61)	(209)	(29)	(67)	(1.267)	77	(1.190)

	2025							
	B2C	B2B Infra	B2B ICT	Internasional	Lain-lain	Total segmen	Penyesuaian dan eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	52.215	4.318	7.372	5.831	3.142	72.878	-	72.878
Pendapatan antar segmen	1.556	23.338	1.928	747	11.173	38.742	(38.742)	-
Jumlah pendapatan segmen	53.771	27.656	9.300	6.578	14.315	111.620	(38.742)	72.878
Hasil segmen	13.148	7.461	1.421	461	(2.040)	20.451	(3.044)	17.407
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(4.969)	(2.629)	(460)	(135)	(95)	(8.288)	(1.185)	(9.473)
Penyusutan dan amortisasi	(10.791)	(6.272)	(1.220)	(330)	(297)	(18.910)	2.092	(16.818)
Provisi diakui selama periode berjalan	(540)	(4)	(413)	(58)	15	(1.000)	30	(970)

33. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Rekonsiliasi hasil segmen:

	2026	2025
Jumlah hasil segmen	23.352	20.451
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	(1.236)	(276)
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	550	-
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(617)	127
Laba selisih kurs - bersih	282	30
Penghasilan pendanaan	745	887
Biaya pendanaan	(2.079)	(2.647)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(1)	(4)
Penyesuaian dan eliminasi pendapatan (beban) antar segmen - bersih	(2.956)	(1.161)
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasi	**18.040**	**17.407**

Informasi geografis:

	2026	2025
Pendapatan eksternal		
Indonesia	71.195	67.904
Luar negeri	4.683	4.974
Jumlah	**75.878**	**72.878**

Informasi terkait pendapatan di atas didasarkan pada lokasi pelanggan.

Tidak terdapat pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025.

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	167.516	171.604
Luar negeri	3.076	3.086
Jumlah	**170.592**	**174.690**

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan pelaporan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian, peraturan tersebut disesuaikan dengan UU No. 11 tahun 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2021 yang membuat menteri yang berwenang dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 5/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang “Penyelenggaraan Telekomunikasi”. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:
i. Biaya aktivasi;
ii. Biaya berlangganan bulanan;
iii. Biaya penggunaan; dan
iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 31 Maret 2021, Menkomdigi mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 5/2021 yang memberikan pedoman penetapan tarif selular dengan formula yang terdiri dari biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan ritel.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 5/2021, tarif selular untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang terhubung melalui jaringan selular bergerak terdiri dari:
i. Tarif jasa teleponi dasar;
ii. Tarif jasa nilai tambah teleponi; dan/atau
iii. Tarif jasa multimedia.

dengan struktur tarif sebagai berikut:
i. Biaya aktivasi;
ii. Biaya berlangganan bulanan; dan/atau
iii. Biaya penggunaan.

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Pada tahun 2008 Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Indonesia menerbitkan peraturan No. 115 tahun 2008 yang mengatur tentang Perjanjian Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Tarif Layanan Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan yang Dimiliki oleh Penyedia Layanan Sewa Jaringan Dominan sesuai dengan usulan Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur dan perhitungan tarif untuk jasa yang berhubungan dengan sewa jaringan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 30 Juni 2026, jumlah ikatan pembelian barang modal adalah sebesar Rp13.455 miliar dan US$18 juta.

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

Pihak yang terkait dengan kontrak	Periode perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Phincon	12 September 2019- 11 September 2027	Perjanjian Pengadaan *Development and Rollout Agreement* ("DRA") dan *Technical Support Agreement ("TSA") of Customer Relationship Management ("CRM") Solution System Integrator*
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2021- 31 Januari 2027	Perjanjian Pengadaan *Radio Ultimate Solution Rollout Agreements ("ROA")* dan *Technical Service Agreements* ("TSA")
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022- 12 Februari 2028	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution *ROA*
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022- 12 Februari 2028	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution *ROA*
Telkomsel dan PT Phincon	24 Juni 2024- 23 Juni 2029	Perjanjian Desain, Pengembangan, dan Peluncuran Solusi *Platform* By.U
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2024- 31 Agustus 2027	Perjanjian Pengadaan *Evolved Packet Core Technical Support Agreement* ("EPC TSA")
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	1 September 2024- 31 Agustus 2027	Perjanjian Pengadaan *EPC TSA*
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024- 7 Oktober 2029	Perjanjian *Online Charging System ("OCS")* dan *Service Control Points ("SCP") System Solution Development*
TDE dan PT ZTE Indonesia	14 Oktober 2024- 14 Oktober 2027	Perjanjian Kontrak terhadap *General Contractor* ("GC") untuk Proyek Delta Level-2 *Fit Out Works*
Telkomsel dan PT Mahardika Teknotama Integrasi	1 November 2024- 1 November 2027	Perjanjian Pengadaan *Fixed Broadband Core* ("FBB Core")
Perusahaan dan PT Packet Systems Indonesia	18 Desember 2024- 17 Desember 2026	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro ("OTM") *Future State Architecture* ("FSA") - *Platform* Huawei
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	23 Januari 2025- 22 Januari 2028	Perjanjian Pengadaan *Next Generation of Gateway GPRS Support Node ("GGSN") (Virtualized EPC)*
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	25 Maret 2025- 24 Maret 2028	Perjanjian Pengadaan *GGSN Service Complex/Policy Charging Rules Function ("PCRF") Solution*
TDE dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2025- 23 Maret 2028	Perjanjian Kontrak terhadap *General Contractor* ("GC") untuk Proyek Delta Level-3 dan Level-4 *Fit Out Works*
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	8 April 2025- 7 April 2028	Perjanjian Pengadaan *Next Generation of GGSN (Virtualized EPC)*
Telkomsel dan PT Cahaya Mutiara Mandiri	26 Mei 2025- 25 Mei 2028	Perjanjian Pengadaan *Next Generation of GGSN (Virtualized EPC)*
Telkomsat dan PT Starlink Services Indonesia	22 Desember 2025- 31 Desember 2026	Perjanjian Penjualan Kembali Layanan dan Perangkat Starlink
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	24 Desember 2025- 23 Juni 2027	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") Papua Selatan ("PASELA")
TIF dan PT Fiberhome Technologies Indonesia	2 Juni 2026- 30 September 2026	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FTTH PT-2 *Fixed Broadband* ("FBB")

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

(i) Pada tanggal 30 Juni 2026, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 September 2027	Rp	2
BNI	500	31 Maret 2027	Rp	63
Bank Mandiri	500	21 Juni 2027	Rp	84
Jumlah	**1.500**			**149**

Perusahaan memiliki fasilitas bank yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Catatan 37b.v).

(ii) Pada tanggal 30 Juni 2026, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2028	Rp	620
BNI	4.000	1 Mei 2028	Rp	1.535
Jumlah	**5.000**			**2.155**

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 35c.i).

(iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dan BRI dengan batas kredit maksimum masing-masing sebesar US$25 juta dan US$5 juta atau setara dengan Rp417 miliar dan Rp83 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2026, tidak terdapat fasilitas bank garansi yang digunakan.

c. Lainnya

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya penggunaan frekuensi radio ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 025/TEL.01.02/2022 tanggal 28 Januari 2022, Menkomdigi memberikan hak kepada Telkomsel untuk layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan layanan telekomunikasi dasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017, No. 806 Tahun 2019, No. 620 Tahun 2020, No. 178 Tahun 2021, No. 479 Tahun 2022, No. 90 Tahun 2023 dan No. 188 Tahun 2023, Telkomsel disyaratkan, antara lain, untuk:

1. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1.028 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
2. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz Blok A dan C.
3. Menyerahkan *surety bond* sebesar Rp617 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
4. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penggunaan (“BHP”) selama jangka waktu lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel. Atas izin tersebut, Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir:

1. Pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz

   Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 620 Tahun 2020, terkait dengan perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz, sehingga Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi tahunan pada tahun 2020 sampai 2030.

2. Pita frekuensi radio sampai 2,1 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 90 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Pada 27 Februari 2023, Telkomsel memperoleh izin penggunaan tahunan atas penggunaan pita frekuensi radio 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan 2.165-2.170 MHz sampai dengan 18 Maret 2033.
Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkomdigi menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.970-1.975 MHz berpasangan dengan 2.160-2.165 MHz sampai dengan 28 Maret 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkomdigi menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.965-1.970 MHz berpasangan dengan 2.155-2.160 MHz sampai dengan 30 September 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 479 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Telkomsel sebagai pemenang lelang dan berhak atas penggunaan tahunan atas pita frekuensi radio 1.960-1.965 MHz berpasangan dengan 2.150-2.155 MHz, terhitung sejak 11 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2033.

3. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 1896 Tahun 2017	Telkomsel sebagai pemenang atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2.300-2.330 MHz sampai dengan 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 178 Tahun 2021	Telkomsel sebagai pemenang atas penggunaan pita frekuensi radio 2.330-2.340 MHz berpasangan dengan 2.340-2.350 MHz masing-masing untuk Blok A dan C sampai dengan 2030.
Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 92 Tahun 2023	Pada 18 November 2022, Telkomsel memperoleh pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio 2.340-2.355 MHz berpasangan dengan 2.330-2.360 MHz sampai dengan 17 November 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 188 Tahun 2023	Pada 18 April 2023, Telkomsel diberikan persetujuan untuk mengalihkan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz kepada PT Smart Telecom.

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Perjanjian kerja sama spektrum frekuensi radio

Menkomdigi memberikan persetujuan atas kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Telkomsel dan KCIC melalui Surat Keputusan No. B-171/M.KOMINFO/SP.01.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 mengenai Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada rentang 891-895 MHz berpasangan dengan 936-940 MHz, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2030.

Sebagai akibat dari perjanjian ini, KCIC akan membayar sejumlah kompensasi kepada Telkomsel yaitu kompensasi biaya penggunaan tahunan sebesar Rp878 miliar per tahun, biaya jaringan pengganti sebesar Rp1.250 miliar, serta biaya operasional dan perawatan tambahan.

(iii) KPU

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"), sekarang Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan dengan total harga sebesar Rp261 miliar. Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BAKTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp218 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum dikurangi pajak) dan sisa kompensasi masih belum dibayarkan.

Menkomdigi menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerja sama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) Kontinjensi

Berdasarkan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, suatu provisi harus diakui ketika terdapat kewajiban kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Pada bulan Oktober 2023, Grup menerima permintaan dokumen dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC") terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("BAKTI Kominfo") terkait penyediaan infrastruktur 4G *Base Transceiver Station* ("BTS"). Sejak saat itu, SEC telah memperluas penyelidikannya mencakup isu-isu akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan Grup, termasuk laporan publik mengenai proses hukum tertentu di Indonesia yang melibatkan Grup, beberapa entitas anak dan afiliasinya, serta beberapa klien dan pemasok Grup. Melalui proses audit internal dan investigasi yang Grup lakukan, Grup telah menetapkan, atau Grup menduga (untuk proyek dan transaksi yang masih dalam tahap investigasi) bahwa transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi. Terhitung sejak bulan Mei 2024, Grup juga menerima permintaan informasi tambahan dari Departemen Kehakiman A.S. ("DOJ") yang berfokus pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. ("FCPA"). Grup telah menunjuk penasihat hukum eksternal dan auditor forensik untuk melakukan penyelidikan internal terhadap isu-isu yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ. Penyelidikan internal tersebut secara substansial telah selesai, namun penyelidikan oleh SEC dan DOJ masih berlangsung dan Grup terus bekerja sama dengan otoritas tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan internal yang secara substansial telah selesai, Grup mengidentifikasi bahwa sekitar 140 transaksi historis, terutama yang terjadi pada periode sebelum tahun 2021 dan khususnya antara tahun 2016 hingga 2019 dan terutama terkait dengan segmen bisnis *enterprise*, tidak memiliki substansi ekonomi dan tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku serta kebijakan dan pengendalian internal Grup yang mengakibatkan adanya pencatatan yang berlebihan (*overstatement*) atas informasi keuangan tertentu.

Grup tidak meyakini bahwa pencatatan yang berlebihan (*overstatement*) tersebut merupakan salah saji yang material secara kuantitatif terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup untuk setiap periode yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan maupun interim Grup sebelumnya.

Grup menghadapi tantangan dalam mengompilasi informasi historis yang rinci untuk sebagian besar dari 140 transaksi tersebut, yang disebabkan oleh usia transaksi, kendala sistem akuntansi, serta kendala terkait penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen pendukung akuntansi historis yang dalam beberapa kasus berasal dari hampir 10 tahun yang lalu. Perusahaan mengasumsikan bahwa transaksi tertentu tidak memiliki substansi ekonomi kecuali tersedia informasi akuntansi dan dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan sebaliknya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, sebagian besar piutang usaha yang terkait dengan transaksi tersebut telah memiliki pencadangan penuh dalam laporan laba rugi serta penyisihan terkait kerugian kredit ekspektasian, sehingga piutang usaha neto atas transaksi tersebut yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan sejak tahun 2020 dan seterusnya bersifat tidak material (*de minimis*).

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) Kontinjensi (lanjutan)

Grup menetapkan bahwa piutang usaha bruto sebesar Rp1.762 miliar beserta cadangan kerugian kredit ekspektasian terkait sebesar Rp1.762 miliar yang berasal dari transaksi historis yang telah ditinjau atau dijadwalkan untuk ditinjau dalam investigasi internal, tidak memiliki kemungkinan yang wajar untuk dapat dipulihkan dan oleh karena itu tidak lagi memenuhi kriteria penyajian sebagai piutang usaha, dan pada tanggal 31 Desember 2025 piutang tersebut telah dihapusbukukan karena tidak memiliki substansi ekonomi dan tidak memiliki ekspektasi pemulihan yang wajar, serta telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak penagihan Grup.

Perusahaan merupakan BUMN, sehingga proses penghapusan piutang Perusahaan tunduk pada ketentuan tata kelola dan regulasi tertentu yang berlaku bagi BUMN. Berdasarkan kebijakan penghapusan piutang yang berlaku, piutang yang melebihi batas tertentu dan/atau piutang dengan karakteristik tertentu memerlukan persetujuan dari otoritas terkait dan/atau instansi pemerintah. Dengan demikian, penyelesaian dan waktu pelaksanaan proses penghapusan piutang tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali Manajemen, karena bergantung pada proses penelaahan dan persetujuan eksternal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah.

Grup juga telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Pemerintah Indonesia dan melakukan pelaporan mandiri (*self-reporting*) yang melibatkan dugaan atau potensi pelanggaran hukum dan peraturan Indonesia oleh Grup, beberapa entitas anak, dan afiliasinya, termasuk antikorupsi, dugaan penipuan, penggelapan, dan masalah yang terkait dengan piutang usaha, beberapa di antaranya terkait dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ. Grup telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk penguatan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal, serta peningkatan fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

Untuk investigasi yang disebutkan di atas terkait isu akuntansi dan pengungkapan Grup mengenai pengakuan pendapatan, praktik pelaporan keuangan, serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan, berdasarkan penilaian Grup hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup saat ini tidak meyakini bahwa investigasi tersebut akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025.

Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup belum dapat mengestimasi secara andal potensi kerugian atau rentang kerugian yang mungkin timbul dari penyelidikan oleh SEC dan DOJ, mengingat masih adanya ketidakpastian signifikan terkait hasil akhir, waktu penyelesaian, serta potensi sanksi atau dampak lainnya.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa hasil akhir dari penyelidikan yang sedang berlangsung atau identifikasi informasi tambahan di masa mendatang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan, hasil usaha, atau arus kas Grup.

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026		
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset			
Kas dan setara kas	559,20	36,83	10.649
Aset keuangan lancar lainnya	78,32	0,01	1.398
Piutang usaha			
Pihak berelasi	0,32	0,02	6
Pihak ketiga	129,04	13,53	2.549
Aset kontrak	4,68	-	84
Piutang lain-lain	1,61	0,92	45
Aset lancar lainnya	3,57	0,34	70
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	230,11	7,04	4.239
Aset tidak lancar lainnya	1,40	0,66	37
Jumlah aset	1.008,25	59,35	19.077
Liabilitas			
Utang usaha			
Pihak berelasi	(0,02)	-	(1)
Pihak ketiga	(160,32)	(5,28)	(2.958)
Utang lain-lain	(4,54)	(1,63)	(111)
Beban yang masih harus dibayar	(10,07)	(10,89)	(380)
Deposit dari pelanggan	(4,12)	(0,34)	(80)
Pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9,20)	(0,35)	(171)
Pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa	(21,56)	(1,10)	(406)
Liabilitas lainnya	(0,83)	-	(14)
Jumlah liabilitas	(210,66)	(19,59)	(4.121)
Aset (liabilitas) bersih	**797,59**	**39,76**	**14.956**

	31 Desember 2025		
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset			
Kas dan setara kas	522,25	21,10	9.097
Aset keuangan lancar lainnya	53,23	-	895
Piutang usaha			
Pihak berelasi	0,24	0,02	3
Pihak ketiga	144,38	11,90	2.620
Aset kontrak	4,42	-	75
Piutang lain-lain	0,62	-	10
Aset lancar lainnya	1,45	0,35	30
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	307,89	6,17	5.241
Aset tidak lancar lainnya	0,40	0,74	19
Jumlah aset	1.034,88	40,28	17.990
Liabilitas			
Utang usaha			
Pihak berelasi	(0,05)	-	(1)
Pihak ketiga	(158,59)	(3,06)	(2.707)
Utang lain-lain	(19,61)	(2,17)	(365)
Beban yang masih harus dibayar	(11,17)	(11,08)	(373)
Deposit dari pelanggan	(3,98)	(0,32)	(72)
Pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,82)	(0,35)	(187)
Pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa	(23,03)	(1,30)	(408)
Liabilitas lainnya	(0,36)	-	(6)
Jumlah liabilitas	(227,61)	(18,28)	(4.119)
Aset (liabilitas) bersih	**807,27**	**22,00**	**13.871**

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lain-lain disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

37. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset Keuangan

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	54.577	34.228
Aset keuangan lancar lainnya	1.919	1.326
Piutang usaha	11.756	11.223
Piutang lain-lain	271	172
Aset tidak lancar lainnya	163	208
FVTPL		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	5.704	7.254
Aset keuangan lancar lainnya	89	94
FVTOCI		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	27	27
Jumlah aset keuangan	**74.506**	**54.532**

(b) Liabilitas Keuangan

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha	13.261	16.184
Utang lain-lain	24.881	648
Beban yang masih harus dibayar	15.024	14.867
Deposit dari pelanggan	83	52
Utang bank jangka pendek	8.797	6.929
Obligasi	2.696	2.696
Utang bank jangka panjang	45.403	41.149
Liabilitas sewa	23.930	24.137
Jumlah liabilitas keuangan	**134.075**	**106.662**

ii. Nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

			Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
30 Juni 2026	**Jumlah nilai tercatat**	**Nilai wajar**	**Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)**	**Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)**	**Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)**
FVTPL					
Aset keuangan lancar lainnya	89	89	89	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	5.704	5.704	1.195	-	4.509
FVTOCI					
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	27	27	-	-	27
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Obligasi	2.696	3.214	3.214	-	-
Utang bank jangka panjang	45.403	45.178	-	-	45.178
Liabilitas sewa	23.930	23.930	-	-	23.930
Jumlah	**77.849**	**78.142**	**4.498**	**-**	**73.644**

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan (lanjutan):

			Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
31 Desember 2025	**Jumlah nilai tercatat**	**Nilai wajar**	**Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)**	**Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)**	**Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)**
FVTPL					
Aset keuangan lancar lainnya	94	94	94	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	7.254	7.254	1.529	-	5.725
FVTOCI					
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	27	27	-	-	27
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Obligasi	2.696	3.458	3.458	-	-
Utang bank jangka panjang	41.149	40.863	-	-	40.863
Liabilitas sewa	24.137	24.137	-	-	24.137
Liabilitas lainnya	75	75	-	-	75
Jumlah	**75.432**	**75.908**	**5.081**	**-**	**70.827**

Kerugian atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi konsolidasian periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 senilai Rp902 miliar.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah:

	30 Juni 2026	**31 Desember 2025**
Saldo awal	5.752	6.557
Rugi yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	(902)	(103)
Pembelian/penambahan	-	26
Penjualan/pengurangan	(314)	(728)
Saldo akhir	**4.536**	**5.752**

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Analisis Sensitivitas

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan informasi kuantitatif atas input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan pada pengukuran nilai wajar level 3:

Industri	Teknik valuasi	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi	Rentang (rata-rata tertimbang)	Sensitivitas atas input nilai wajar
Investasi ekuitas				
Investasi ekuitas tidak terdaftar - teknologi	*OPM Backsolve method*	*Volatility*	20%-116,01%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada *percentage of volatility* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp5 miliar pada nilai investasi
		Time to liquidity	0,5-4,5 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun *time to liquidity* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp6 miliar pada nilai investasi
	Guideline Public Company Method	*Volatility*	20%-103,19%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada *percentage of volatility* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp53 miliar pada nilai investasi
		Time to liquidity	0,5-5,5 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun *time to liquidity* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp73 miliar pada nilai investasi
Investasi ekuitas tidak terdaftar - lembaga pemeringkat kredit	*Discounted cash flow*	*Weighted Average Cost of Capital ("*WACC*")*	9%-22%	Penurunan (kenaikan) sebesar 1% pada WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp5 miliar pada nilai investasi
		Terminal growth rate	1%-5%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada *terminal growth rate* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp3 miliar pada nilai investasi
Investasi ekuitas tidak terdaftar - telekomunikasi	*Discounted cash flow*	WACC	3,03%-13,20%	Penurunan (kenaikan) sebesar 0,5% pada WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp6 miliar pada nilai investasi
		Terminal growth rate	1,97%-3,10%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada *terminal growth rate* akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp12 miliar pada nilai investasi

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction.*

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya)) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

(a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi dan investasi entitas anak (investasi ekuitas tidak terdaftar) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan;
(b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasikan dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

(a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan;
(b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko kurs, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan kurs dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Unit *Group Financial Accounting and Treasury* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Group Financial Accounting and Treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)
Aset keuangan	1,01	1,03
Liabilitas keuangan	(0,21)	(0,23)
Eksposur bersih	**0,80**	**0,80**

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 30 Juni 2026 akan meningkatkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian kurs yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
30 Juni 2026	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	143

Pelemahan Dolar A.S. terhadap Rupiah pada 30 Juni 2026 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 30 Juni 2026, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 18 dan 19). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga. Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pinjaman bunga tetap	44.715	37.407
Pinjaman bunga mengambang	36.111	37.504

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 30 Juni 2026, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp90 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya kurs, tidak berubah.

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas dan setara kas	54.577	34.228
Aset keuangan lancar lainnya	2.008	1.420
Piutang usaha	11.756	11.223
Piutang lain-lain	271	172
Aset tidak lancar lainnya	163	208
Jumlah	**68.775**	**47.251**

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Group Financial Accounting and Treasury* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya, karena dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit di mana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 7,59% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2026 (2025: 7,95%).

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, di mana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt to equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2026	2027	2028	2029	2030 dan selanjutnya
30 Juni 2026							
Utang usaha	13.261	(13.261)	(13.261)	-	-	-	-
Utang lain-lain	24.881	(24.881)	(24.881)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	15.024	(15.024)	(15.024)	-	-	-	-
Deposit dari pelanggan	83	(83)	(83)	-	-	-	-
Pinjaman:							
Utang bank jangka pendek	8.797	(8.797)	(8.797)	-	-	-	-
Obligasi	2.696	(6.397)	(296)	(149)	(297)	(296)	(5.359)
Utang bank jangka panjang	45.403	(51.233)	(22.179)	(4.057)	(7.482)	(6.576)	(10.939)
Liabilitas sewa	23.930	(28.922)	(6.938)	(1.762)	(4.043)	(3.841)	(12.338)
Jumlah	**134.075**	**(148.598)**	**(91.459)**	**(5.968)**	**(11.822)**	**(10.713)**	**(28.636)**

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2025	2026	2027	2028	2029 dan selanjutnya
31 Desember 2025							
Utang usaha	16.184	(16.184)	(16.184)	-	-	-	-
Utang lain-lain	648	(648)	(648)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.867	(14.867)	(14.867)	-	-	-	-
Deposit dari pelanggan	52	(52)	(52)	-	-	-	-
Pinjaman:							
Utang bank jangka pendek	6.929	(6.929)	(6.929)	-	-	-	-
Obligasi	2.696	(6.544)	(296)	(296)	(297)	(296)	(5.359)
Utang bank jangka panjang	41.149	(45.311)	(19.003)	(7.279)	(6.357)	(5.499)	(7.173)
Liabilitas sewa	24.137	(29.037)	(6.844)	(4.438)	(3.604)	(3.440)	(10.711)
Liabilitas lainnya	75	(89)	(4)	(21)	(21)	(21)	(22)
Jumlah	**106.737**	**(119.661)**	**(64.827)**	**(12.034)**	**(10.279)**	**(9.256)**	**(23.265)**

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

38. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026		31 Desember 2025	
	Jumlah	**Bagian**	**Jumlah**	**Bagian**
Utang jangka pendek	8.797	4,43%	6.929	3,37%
Utang jangka panjang	72.029	36,28%	67.982	33,07%
Total utang	80.826	40,71%	74.911	36,44%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	117.719	59,29%	130.685	63,56%
Jumlah	**198.545**	**100,00%**	**205.596**	**100,00%**

38. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektivitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau di bawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Jumlah utang dengan bunga	80.826	74.911
Dikurangi: kas dan setara kas	(54.577)	(34.228)
Utang bersih	26.249	40.683
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	117.719	130.685
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	**22,30%**	**31,13%**

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 19. Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal.

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

	2026	2025
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	2.521	1.807
Kapitalisasi bunga	4	2
Penambahan aset hak-guna melalui:		
Liabilitas sewa (Catatan 12)	3.978	3.702
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	130	154

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2026	Arus kas	Perubahan non-tunai: Perubahan valuta asing	Perubahan non-tunai: Sewa baru	Perubahan non-tunai: Perubahan lainnya	30 Juni 2026
Utang bank jangka pendek	6.929	1.868	-	-	-	8.797
Obligasi	2.696	-	-	-	-	2.696
Utang bank jangka panjang	41.149	4.229	15	-	10	45.403
Liabilitas sewa	24.137	(4.337)	21	3.978	131	23.930
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**74.911**	**1.760**	**36**	**3.978**	**141**	**80.826**

40. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI

Grup menerbitkan kembali laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2026 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, untuk:

a. menggambarkan dampak atas perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2z.iii.
b. mengoreksi kesalahan periode saat ini dan sebelumnya, antara lain, pada akun-akun investasi jangka panjang, penghasilan komprehensif lain, dan liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya.
c. mereklasifikasi keuntungan atas pelepasan entitas anak dari penghasilan (beban) lain-lain - bersih agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi konsolidasian interim.

Dampak terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim

30 Juni 2026	Catatan	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Koreksi	Disajikan kembali
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	3	54.579	(2)	54.577
Piutang usaha - pihak berelasi	5	1.945	66	2.011
Piutang usaha - pihak ketiga	5	9.829	(84)	9.745
Klaim restitusi pajak dan pajak dibayar di muka	27	2.445	(14)	2.431
Aset lancar lainnya	8	6.010	(4)	6.006
Jumlah Aset Lancar		**80.932**	**(38)**	**80.894**
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi jangka panjang	10	6.737	(901)	5.836
Aset tetap	11	161.643	(53)	161.590
Aset hak-guna	12a	28.858	(35)	28.823
Aset pajak tangguhan	27f	7.986	(203)	7.783
Aset tidak lancar lainnya	13	6.350	2	6.352
Jumlah Aset Tidak Lancar		**222.155**	**(1.190)**	**220.965**
JUMLAH ASET		**303.087**	**(1.228)**	**301.859**
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak berelasi	15	463	19	482
Utang usaha - pihak ketiga	15	12.881	(102)	12.779
Liabilitas kontrak	17a	8.255	(1)	8.254
Utang lain-lain	37	24.886	(5)	24.881
Utang pajak	27c	4.317	(12)	4.305
Deposit dari pelanggan	32	1.584	(1)	1.583
Utang bank jangka pendek	18	8.816	(19)	8.797
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	12a	5.655	(5)	5.650
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**102.358**	**(126)**	**102.232**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	27f	2.494	(154)	2.340
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	31	1.356	(147)	1.209
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	30	12.855	(388)	12.467
Liabilitas sewa	12a	18.315	(35)	18.280
Liabilitas tidak lancar lainnya		385	1	386
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**65.881**	**(723)**	**65.158**
JUMLAH LIABILITAS		**168.239**	**(849)**	**167.390**
EKUITAS				
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	29	86.478	(614)	85.864
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**118.333**	**(614)**	**117.719**
Kepentingan nonpengendali	20	16.515	235	16.750
JUMLAH EKUITAS		**134.848**	**(379)**	**134.469**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**303.087**	**(1.228)**	**301.859**

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

40. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI (lanjutan)

Dampak terhadap Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim

2026	Catatan	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Koreksi	Reklasifikasi	Disajikan kembali
Beban karyawan	24	(7.721)	138	-	(7.583)
Beban umum dan administrasi	26	(3.666)	(3)	-	(3.669)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	(335)	(901)	-	(1.236)
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	1e	-	-	550	550
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih		(75)	8	(550)	(617)
LABA USAHA		**20.133**	**(758)**	**-**	**19.375**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**18.798**	**(758)**	**-**	**18.040**
Pajak kini	27d	(4.732)	1	-	(4.731)
Pajak tangguhan	27d	140	125	-	265
Beban pajak penghasilan - bersih		**(4.592)**	**126**	**-**	**(4.466)**
LABA PERIODE BERJALAN		**14.206**	**(632)**	**-**	**13.574**
Laba (rugi) aktuaria program manfaat pasti - bersih	30	(2)	240	-	238
Penghasilan komprehensif lain - bersih		**493**	**240**	**-**	**733**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		**14.699**	**(392)**	**-**	**14.307**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		10.623	(667)	-	9.956
Kepentingan nonpengendali	20	3.583	35	-	3.618
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		11.116	(614)	-	10.502
Kepentingan nonpengendali		3.583	222	-	3.805
Laba per saham dasar (dalam jumlah penuh)	28				
Laba bersih per saham		107,50	(6,75)	-	100,75
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		10.750,30	(674,99)	-	10.075,31

2025	Catatan	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi (Catatan 2z.iii)	Koreksi	Disajikan kembali
PENDAPATAN	23	73.004	-	(126)	72.878
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	25	(19.760)	-	86	(19.674)
Beban penyusutan dan amortisasi	11,12a,14	(16.198)	(620)	-	(16.818)
Beban karyawan	24	(8.075)	-	47	(8.028)
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih		243	-	(116)	127
Laba selisih kurs - bersih		31	-	(1)	30
LABA USAHA		**19.901**	**(620)**	**(110)**	**19.171**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**18.137**	**(620)**	**(110)**	**17.407**
Pajak tangguhan	27d	111	118	601	830
Beban pajak penghasilan - bersih		**(4.011)**	**118**	**601**	**(3.292)**
LABA PERIODE BERJALAN		**14.126**	**(502)**	**491**	**14.115**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		**14.250**	**(502)**	**491**	**14.239**
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		10.975	(502)	310	10.783
Kepentingan nonpengendali	20	3.151	-	181	3.332
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		11.099	(502)	310	10.907
Kepentingan nonpengendali		3.151	-	181	3.332
Laba per saham dasar (dalam jumlah penuh)	28				
Laba bersih per saham		110,79	(5,07)	3,13	108,85
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		11.078,90	(506,76)	312,95	10.885,09

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No. 150 tanggal 30 Juni 2026 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., pemegang saham menyetujui penggabungan PST dan UMT ke dalam Mitratel. Mitratel juga telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui Surat No. S-55/D.04/2026 tanggal 26 Juni 2026. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Akta Penggabungan No. 153 tanggal 30 Juni 2026 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0365315, sehingga berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Sejak tanggal tersebut, seluruh aset, liabilitas, hak, kewajiban, dan kegiatan usaha kedua entitas beralih kepada Mitratel sebagai entitas penerima penggabungan. Karena efektif setelah tanggal pelaporan, penggabungan usaha tersebut tidak memengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2026.

b. Pada tanggal 1 Juli 2026, 6 Juli 2026, dan 22 Juli 2026, Telkomsel telah melunasi pinjaman bank kepada BNI, Bank ANZ, dan Bank Sinarmas masing-masing sebesar Rp3.000 miliar, Rp1.000 miliar, dan Rp1.000 miliar.

c. Selama periode Juli 2026, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman kepada Bank Sinarmas, Bank ANZ, dan CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp1.000 miliar.

d. Telkomsel memperoleh total alokasi spektrum sebanyak 100 MHz, dengan rincian 2x10 MHz pada pita 700 MHz dan 80 MHz pada pita 2,6 GHz pada Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz tahun 2026. Dengan berakhirnya masa sanggahan hasil seleksi pada 14 Juli 2026, maka Telkomsel telah resmi ditetapkan sebagai pemenang seleksi atas alokasi spektrum tersebut.

e. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 273/PUU-XXIII/2025 yang mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan opsi yang melindungi kuota data berbayar yang belum digunakan tanpa dikenakan biaya tambahan, namun tidak mewajibkan penerapan akumulasi kuota secara otomatis untuk seluruh paket. Saat ini, Manajemen sedang melakukan diskusi dan koordinasi dengan Menkomdigi untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut terkait ketentuan regulasi serta mengkaji langkah implementasi yang diperlukan. Penerapan ketentuan tersebut bersifat prospektif dan tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 Juni 2026.

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

f. Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dinyatakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 30 September 2026 tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dimana sebelumnya:

Direktur Utama	Dian Siswarini
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Arthur Angelo Syailendra
Direktur *Human Capital Management*	Willy Saelan
Direktur *Wholesale & International Service*	Budi Satria Dharma Purba
Direktur *Enterprise & Business Service*	Veranita Yosephine
Direktur *Strategic Business Development & Portfolio*	Seno Soemadji
Direktur *Network*	Nanang Hendarno
Direktur *IT Digital*	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur *Legal & Compliance*	Andy Kelana
Komisaris Utama	Angga Raka Prabowo
Komisaris	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Ossy Dermawan
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris Independen	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	Ira Noviarti
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Anthony Leong

menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	Nanang Hendarno
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Arthur Angelo Syailendra
Direktur *Human Capital Management*	Willy Saelan
Direktur *Wholesale & International Service*	Radita Ali Putra
Direktur *Enterprise & Business Service*	Veranita Yosephine
Direktur *Strategic Business Development & Portfolio*	Seno Soemadji
Direktur *Network*	Budi Satria Dharma Purba
Direktur *IT Digital*	Kharim I. G. Siregar
Direktur *Legal & Compliance*	Andy Kelana
Komisaris Utama	Angga Raka Prabowo
Komisaris	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Ossy Dermawan
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris Independen	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	Ira Noviarti
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Anthony Leong

g. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 6 Oktober 2026 antara Metra dan MDI sebagai penjual dengan DAM sebagai pembeli sehubungan dengan saham Para Penjual di Metra TV, Para Pihak menyepakati rencana pengambilalihan 1.212.158 lembar saham Metra TV oleh DAM dengan nilai transaksi sebesar Rp155 miliar. Saham tersebut terdiri dari 1.212.157 lembar saham milik Metra senilai Rp154,999 miliar dan 1 lembar saham milik MDI senilai Rp127.871. Pelaksanaan transaksi tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan persyaratan pendahuluan serta ketentuan lainnya sesuai perjanjian.

h. Pada tanggal 16 Oktober 2026, Sigma melakukan pelunasan pinjaman jangka pendek kepada HSBC dan BNI masing-masing sebesar Rp640 miliar dan Rp150 miliar.

i. Pada tanggal 1, 22, dan 28 Oktober 2026, Telkomsel secara bertahap melunasi pinjaman kepada BNI, CIMB Niaga, dan BSI masing-masing sebesar Rp4.000 miliar, Rp1.000 miliar, dan Rp2.000 miliar.

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

j. Pada tanggal 28 Oktober 2026, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan saat ini sedang melakukan kajian untuk mengevaluasi potensi dampak penerapan Undang-Undang tersebut terhadap kewajiban imbalan kerja Grup.

k. Pada tanggal 28 Oktober 2026, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman kepada BRI sebesar Rp1.000 miliar.

l. Telah diumumkan rencana penggabungan Telkom Akses dengan Telkom Infra pada tanggal 30 Oktober 2026. Pelaksanaan penggabungan direncanakan untuk memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 November 2026 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027. Atas rencana tersebut, Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap implikasi penggabungan terhadap struktur entitas dan laporan keuangan konsolidasian.

m. Pada tanggal 6 November 2026, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman kepada BNI, CIMB Niaga, MUFG, dan Bank Permata masing-masing sebesar Rp3.000 miliar, Rp1.000 miliar, Rp1.000 miliar, dan Rp1.000 miliar.

n. Pada tanggal 20 November 2026, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman kepada Bank Sinarmas sebesar Rp1.000 miliar.

o. Pada tanggal 20 November 2026, Telkomsel secara bertahap melunasi pinjaman kepada Bank Permata sebesar Rp1.000 miliar.

p. Sejak bulan Juli 2026, Metra melakukan beberapa aktivitas untuk proses divestasi atas kepemilikan sahamnya pada MDI dan SSI, antara lain penyampaian informasi dan penawaran kepada beberapa calon pembeli potensial. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada perjanjian mengikat yang ditandatangani atas penjualan saham MDI maupun SSI. Penyelesaian transaksi masih bergantung pada hasil uji tuntas, kesepakatan final para pihak, serta persetujuan korporasi dan regulator yang berlaku. Perusahaan memperkirakan bahwa proses divestasi tersebut dapat diselesaikan pada triwulan IV tahun 2026, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan proses negosiasi dan pemenuhan seluruh persyaratan transaksi yang berlaku.